

**IMPLEMENTASI KELOMPOK SADAR
WISATA DI KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAHMAT HIDAYAT
NIM. 180802108

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 180802108
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Patek, 24 Desember 1999
Alamat : Ds. Pantan Makmur, Kec. Krueng Sabee, Aceh
Jaya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2025
Yang Menyatakan



Rahmat Hidayat
NIM. 180802108

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI KELOMPOK SADAR WISATA DI KABUPATEN ACEH JAYA

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RAHMAT HIDAYAT

NIM: 180802108

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

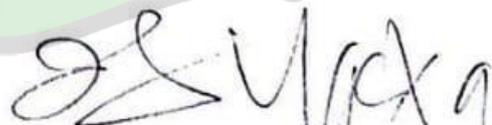
Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP: 197911172023212012



Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.
NIP: 198611122015031005

**IMPLEMENTASI KELOMPOK SADAR WISATA DI
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

RAHMAT HIDAYAT
180802108

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/ Tanggal: Senin 28 April 2025
29 syawal 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP: 197911172023212012

Penguji I,

Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,

Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.
NIP: 198611122015031005

Penguji II,

Zakki Fuad Khalil S.IP., M.SI.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan,



Dr. Muji Mulia., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Abstrak

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Aceh Jaya telah memberikan sumbangsih di sektor pariwisata, diantaranya adalah adanya pengelolaan wisata yang baik di Kabupaten Aceh Jaya, terselenggaranya beberapa event wisata dan kebudayaan, *open camping*, atraksi hiburan (wahana), terpenuhinya manajemen pariwisata, terpenuhinya pengelolaan lokasi (rancangan proyek) pariwisata setempat dan tercapainya sistem promosi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya dan mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kelompok sadar wisata belum berjalan efektif karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Komunikasi yang dilakukan antara Disparekrafpora dan Pokdarwis telah berjalan baik. Dalam hal sumber daya, Disparekrafpora menyediakan dukungan program bagi Pokdarwis, seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta bantuan berbentuk program-program penunjang. Kemudian disposisi positif dan komitmen yang kuat dari pihak Disparekrafpora dan melibatkan masyarakat secara aktif melalui Pokdarwis mencerminkan sikap demokratis dan kepercayaan terhadap kapasitas lokal untuk turut serta dalam pembangunan pariwisata daerah. Dari segi struktur birokrasi, pengelolaan Pokdarwis telah terintegrasi dalam sistem kelembagaan Disparekrafpora, sebagaimana dijelaskan bahwa Pokdarwis berada di bawah pengawasan langsung dinas melalui SK. Selain itu, kerja sama antara Disparekrafpora dan pemerintah desa menunjukkan adanya koordinasi lintas level pemerintahan. Adapun kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya meliputi keterbatasan anggaran dalam pengembangan destinasi wisata dan kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola tempat wisata serta kurangnya bantuan promosi dari masyarakat setempat, hal ini disebabkan adanya miss komunikasi antara sesama masyarakat dan tokoh agama.

Kata Kunci: Implementasi, Pokdarwis, Pariwisata

KATA PENGANTAR

Puji syukur serta nikmat kepada Allah SWT atas segala rahmatnya yang melimpah. sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Kelompok Sadar Wisata Di Kabupaten Aceh Jaya”. Shalawat diiringi salam tidak lupa pula kita sajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penelitian ini, tentu tidak lepas dari pengarahannya dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Maka peneliti ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut :

1. Dr. Muji Mulia., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku Penasehat Akademik peneliti
3. Muazzinah, M.P.A selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Orang tua selaku pemberi semangat dan pemberi motivasi disetiap keluhan-keluhan yang datang setiap harinya.
5. Fazilah Safitri selaku pemberi semangat serta terus motivasi peneliti dalam Menyusun skripsi ini.
6. Informan selaku pemberi data primer dan sekunder kepada peneliti

Banda Aceh, 01 Januari 2025

Rahmat Hidayat
NIM 180802108

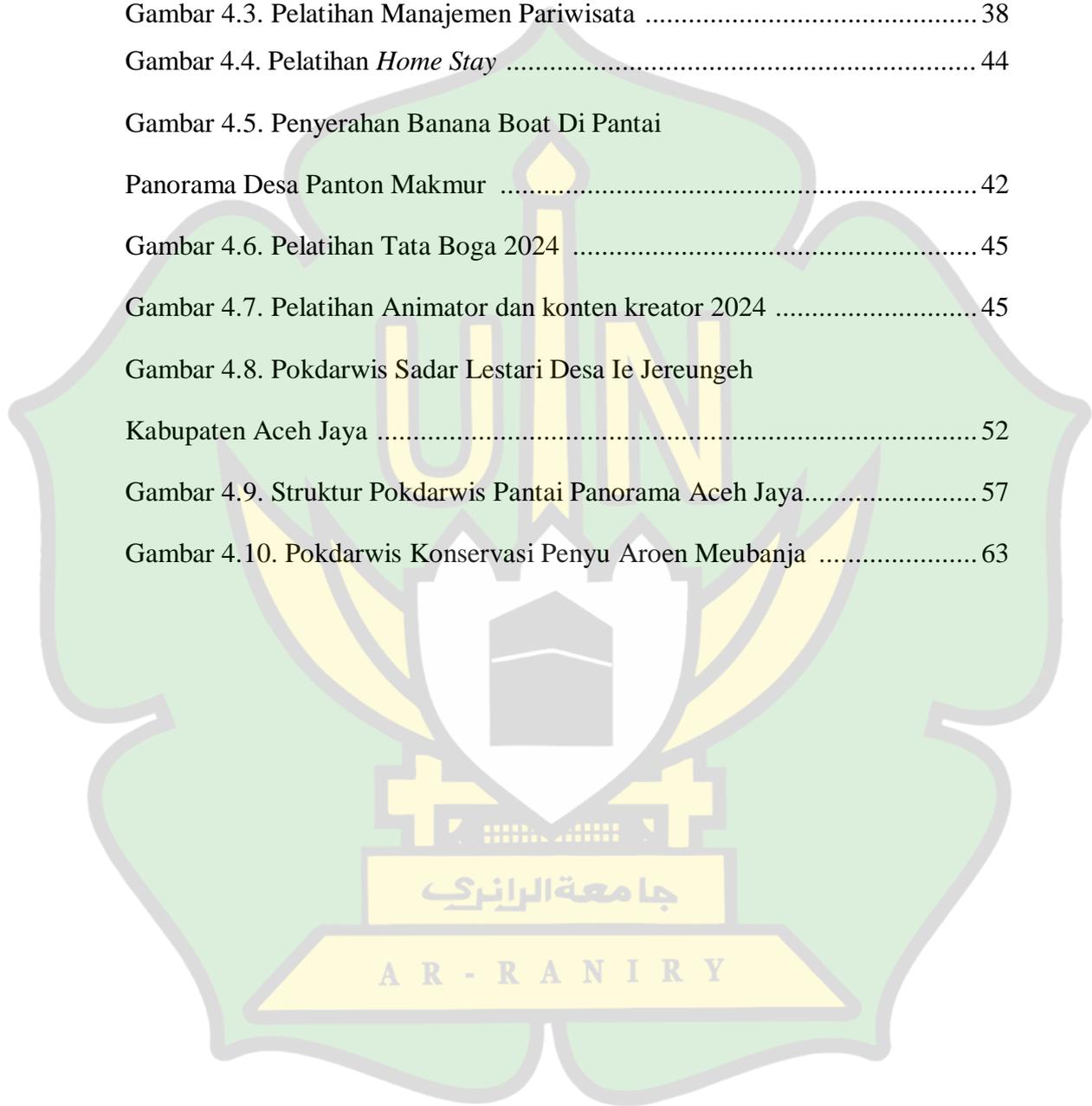
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Implementasi Kebijakan.....	10
2.2 Konsep Pokdarwis	12
2.3 Teori Pariwisata	14
2.4 Penelitian yang Relevan	15
2.5 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Pendekatan penelitian	21
3.2 Fokus penelitian.....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	22
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5 Informan Penelitian.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	27
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	27
4.1.1. Sejarah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya	27
4.1.2. Visi Misi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya	28
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya	29
4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian	32
4.2.1. Implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya.....	32
4.2.2. Kendala Implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya	62
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	75

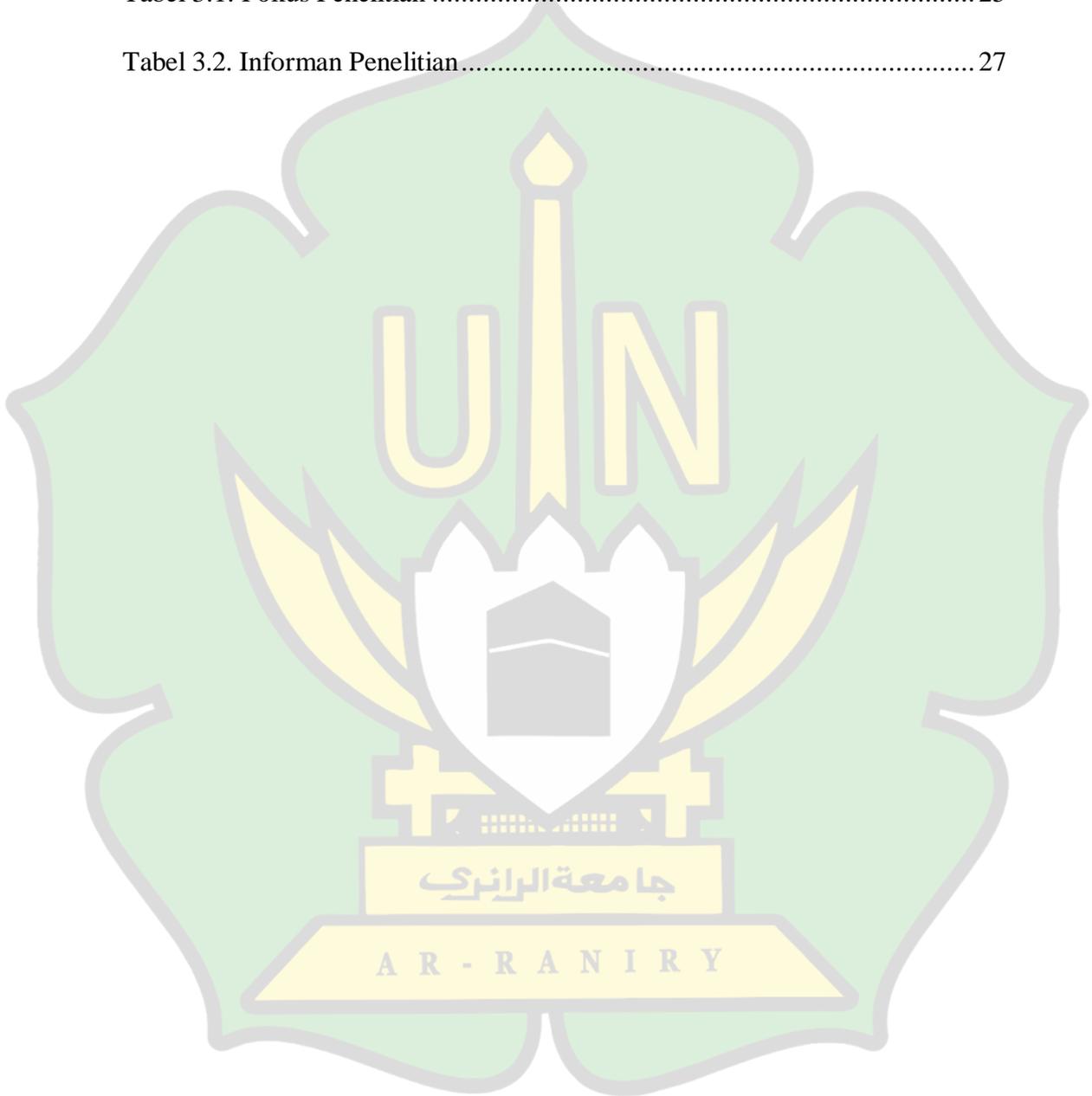
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kondisi Jalan Wisata Ie Jeureungeh.....	34
Gambar 4.2. Anggaran Disparekrafpora Aceh Jaya Tahun 2023.....	34
Gambar 4.3. Pelatihan Manajemen Pariwisata	38
Gambar 4.4. Pelatihan <i>Home Stay</i>	44
Gambar 4.5. Penyerahan Banana Boat Di Pantai Panorama Desa Panton Makmur	42
Gambar 4.6. Pelatihan Tata Boga 2024	45
Gambar 4.7. Pelatihan Animator dan konten kreator 2024	45
Gambar 4.8. Pokdarwis Sadar Lestari Desa Ie Jereungeh Kabupaten Aceh Jaya	52
Gambar 4.9. Struktur Pokdarwis Pantai Panorama Aceh Jaya.....	57
Gambar 4.10. Pokdarwis Konservasi Penyu Aroen Meubanja	63



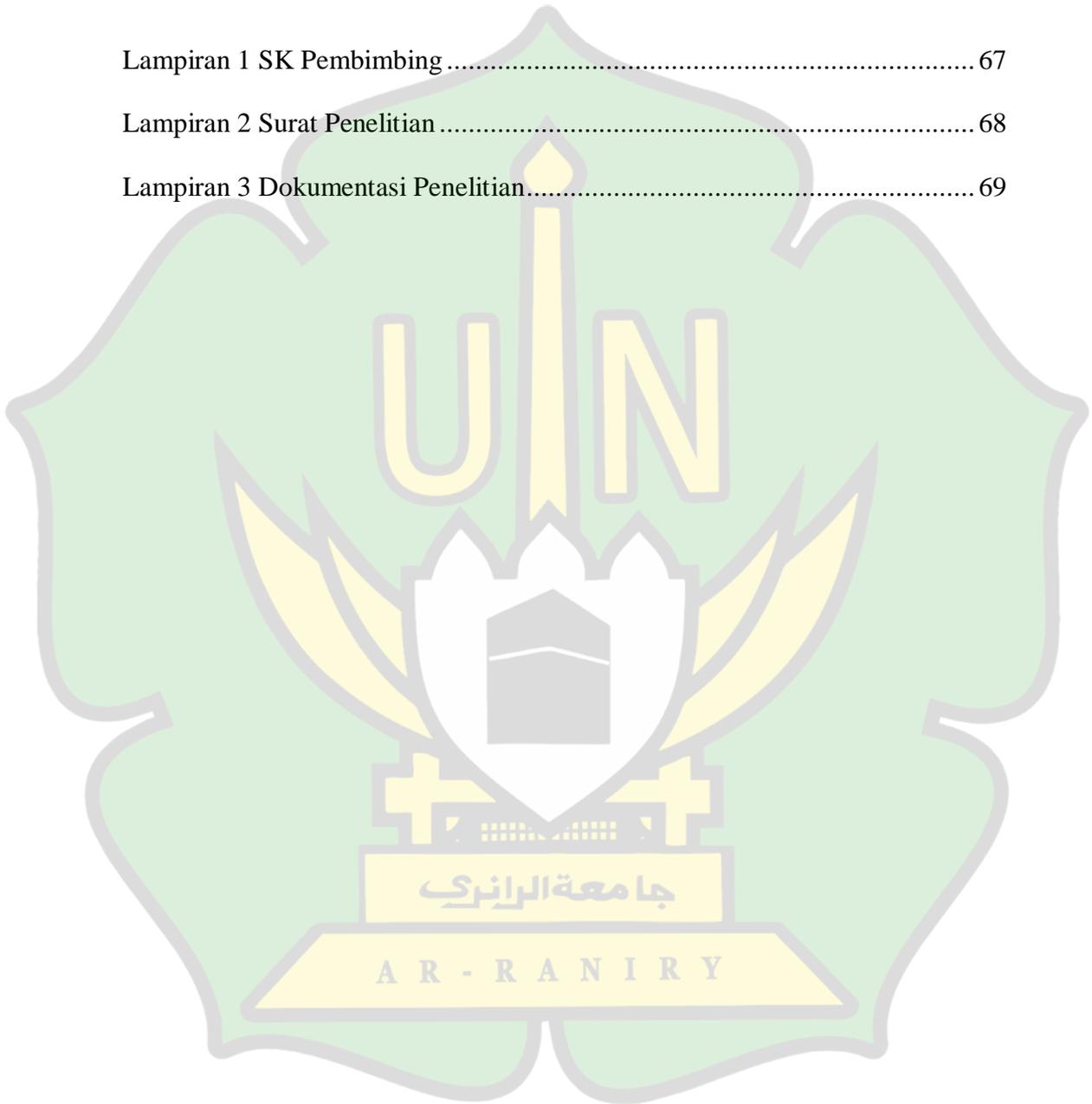
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan	19
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	25
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	67
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	68
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa menjadi penggerak perekonomian dari tingkat desa maupun tingkat yang lebih besar, maka dari itu perlu diberi perhatian khusus agar dapat berkembang dengan baik suatu program di bidang pariwisata. Guna memajukan sektor pariwisata, dibutuhkan berbagai upaya untuk pengembangan pariwisata di daerah-daerah. “Salah satu konsep yang bisa mendukung pengembangan pariwisata adalah dengan Gerakan Sadar Wisata. Gerakan Sadar Wisata merupakan suatu konsep yang berorientasi pada partisipasi dari berbagai pihak dalam mendorong upaya-upaya pengembangan di sektor pariwisata.”¹

Keberadaan Pokdarwis sebagai suatu institusi lokal yang terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki tekad terhadap kepedulian dan tanggung jawab untuk mengembangkan desa wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelompok yang bergerak secara swadaya melakukan pengembangan kepariwisataan berdasarkan potensi lokal dan kreatifitas yang dimiliki oleh masing-masing desa. Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 4 Tahun

¹ Pokdarwis Sebagai Penggerak Kepariwisataan Desa
<https://www.masterplandes.com/artikel/pokdarwis-sebagai-penggerak-kepariwisataan-desa/> di
akses pada tanggal 15 Februari 2023

2008 Tentang Sadar Wisata menjelaskan bahwa sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.²

Adapun tujuan dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) meliputi: 1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bermitra dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. 2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi pengembangan kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. 3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.³

Saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia sedang mengupayakan pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing, hal ini disebabkan karena dengan pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak baik lainnya, seperti meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar tempat wisata. Salah satu daerah yang ada di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Aceh Jaya sedang melakukan berbagai upaya untuk pengembangan pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata

² Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata

³ M., & Taufik, L. D. Rudina, "Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Pela Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara" 2022, no. 4 (2022): 796–806.

(Pokdarwis). Dalam praktiknya, terbukti dengan adanya Pokdarwis tersebut dapat memberikan keuntungan untuk pariwisata Kabupaten Aceh Jaya. Pokdarwis Aceh Jaya dilatar belakangi pemikiran bahwa dengan keberadaanya dapat mengembangkan pariwisata yang didalamnya di jalankan oleh masyarakat setempat.

Pokdarwis ini tidak di biyai secara khusus oleh dinas terkait yang memberikan keputusan kepada Pokdarwis untuk mengembangkan pariwisata di tempat masing-masing. Hal ini yang menyebabkan beberapa Pokdarwis Aceh Jaya menjadi terhambat dalam mempromosi destinasi wisata di daerah tersebut. Selain itu, Pokdarwis ditingkat desa ini juga terhambat karena rendahnya dukungan dari desa dan masyarakat dalam pemberdayaan tempat wisata di daerah tersebut, hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap pariwisata ini masih jauh dari kata baik, seperti pariwisata adalah tempat maksiat serta belum bisa melihat dampak positif pariwisata dari ekonomi pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan 5 Desa Wisata dan 10 Destinasi Wisata Unggulan di Kabupaten Aceh Jaya, landasan tersebut ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 556/27/2023 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Aceh Jaya dan Nomor 556/28/2023 tentang penetapan 10 (sepuluh) destinasi unggulan Kabupaten Aceh Jaya. Pada keputusan tersebut menerangkan bahwa ke-5 (lima) desa wisata tersebut adalah 1. Gampong Dayah Baro (Kecamatan Krueng Sabee). 2. Gampong Baro (Kecamatan Setia Bakti). 3. Gampong Ie Jeureungeh (Kecamatan Sampoiniet). 4. Gampong Lhok

Geulumpang (Kecamatan Setia Bakti). 5. Gampong Glee Jong (Kecamatan Jaya)

Sementara 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Unggulan yang lain adalah Situs

1. Makam Po Teumeureuhom.
2. Gampong Portugis/Wisata Agro Gampong Boeh Giri.
3. Sadar Lestari/CRU Sarah Deu.
4. Eko Wisata Manggrove.
5. Kawasan Wisata Lhok Geulumpang.
6. Pantai Panorama.
7. Pasie Luah.
8. Pantai Nissero,
9. Ceuraceu Eumbon.
10. Pantai Lueng Gayo.

Dengan adanya penetapan tersebut dapat dipahami bahwasanya Pemerintah Aceh Jaya memiliki komitmen dalam mengembangkan Desa Wisata dan Destinasi Wisata yang ada di Aceh Jaya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga, yakni Bapak Juanda mengungkapkan bahwa “10 (sepuluh) destinasi wisata dari total 57 (lima puluh tujuh) destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya telah disepakati untuk menjadi destinasi wisata unggulan pada saat kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) di Rumah Rakyat/Pendopo Bupati Aceh Jaya beberapa waktu lalu dan sudah diverifikasi oleh tim verifikator, 10 destinasi dari 57 tersebar di Kecamatan Jaya hingga Kecamatan Pasie Raya, ini dilakukan karena mengingat kita harus memiliki destinasi unggulan yang kita prioritaskan terlebih dahulu dan selanjutnya kita genjot sektor pariwisata

lainnya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat juga”.⁴

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga memang memiliki kewenangan dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya, dalam tugasnya Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga terus melakukan koordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Aceh Jaya dalam menyelenggarakan event-event untuk menarik perhatian wisatawan dari nasional dan internasional untuk berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

Adapun dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Aceh Jaya telah memberikan sumbangsih di sektor pariwisata, diantaranya adalah adanya 1. Pengelolaan wisata yang baik di Kabupaten Aceh Jaya. 2. Terselenggaranya beberapa event wisata dan kebudayaan, *open camping*, atraksi hiburan (wahana). 3. Terpenuhinya manajemen pariwisata, terpenuhinya pengelolaan lokasi (rancangan projek) pariwisata setempat, dan 4. Tercapainya sistem promosi yang baik.

Adanya aturan dan peran bersama dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Aceh Jaya adalah suatu langkah yang cukup positif dalam memberikan manfaat untuk sektor lain di Kabupaten Aceh Jaya kedepannya. berdasarkan data dan analisis di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyelenggaraan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga dan serta melihat kendala-kendala

⁴ *Ibid*

dalam implementasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kelompok Sadar Wisata Pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Aceh Jaya” dengan harapan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk kedepannya.



1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas. Adapun yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran yang dialami oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Aceh Jaya.
2. Hambatan dalam perizinan untuk mengembangkan tempat wisata di daerah tersebut.
3. Kurangnya Promosi Destinasi Wisata

Dari latar belakang di atas mengenai implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya
2. Untuk Mengetahui Kendala dalam Implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diusulkan, "Implementasi Kelompok Sadar Wisata Pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Aceh Jaya," dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaatnya:

Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang implementasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata di tingkat lokal. Ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata dan manajemen pariwisata.
2. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori-teori terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan peran lembaga lokal dalam memajukan sektor pariwisata.

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kendala dan masalah yang dihadapi oleh Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata. Ini akan membantu Pokdarwis dan pemerintah daerah untuk memperbaiki implementasi mereka dan mengatasi masalah-masalah yang ada.
2. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi masalah dalam perizinan pengembangan tempat wisata. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki proses perizinan dan mengurangi hambatan bagi

pengembangan pariwisata.

3. Penelitian ini membantu pemahaman yang lebih baik tentang dampak ekonomi dan sosial dari pengembangan pariwisata, pemerintah daerah dapat mengarahkan upaya mereka ke arah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.
4. Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan alam setempat.
3. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan⁵, yang dimaksud dengan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah.
4. Kelompok Sadar Wisata adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai motivator, penggerak dan komunikator dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh berkembangnya pariwisata dan terwujudnya Saptas Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan.

⁵ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang mengacu pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan dapat terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Menurut pandangan George C. Edward implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:⁶

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu tolak ukur untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan dan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana mencapai tujuan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,

⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, pustaka belajar, Yogyakarta, 2011.

maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau suatu karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi meliputi struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi sebagai berikut: “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun menimbulkan akibat atau dampak nyata masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Merilee S. Grindle menjelaskan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi

kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.⁷

2.2. Konsep Pokdarwis

Kelompok Sadar Wisata merupakan suatu komponen masyarakat yang memiliki niat serta kepedulian untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kelompok sadar wisata adalah kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagai obyek wisata dan daya tarik dalam meningkatkan pembangunan pariwisata di daerah tinggalnya.⁸

Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai motivator, penggerak dan komunikator dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya pariwisata dan terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wisata.⁹

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

⁸ Ika Nurwahyuni, *Pengetahuan Dan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk Sempor Kabupaten Kebumen*, Unnes Press, 2019.

⁹ Ika Nurwahyuni, *Pengetahuan Dan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk Sempor Kabupaten Kebumen*, Unnes Press, 2019.

Ruang lingkup kegiatan Pokdarwis meliputi kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan Pokdarwis tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis di bidang kepariwisataan
2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya
3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya
4. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona
5. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat
6. Memberikan saran dan masukan kepada aparat pemerintah dalam upaya pengembangan kepariwisataan di daerah setempat.

¹⁰ KKN-PPM Buayan Menawan, *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*, 2021.

2.3. Teori Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan suatu landasan hukum yang mengatur dan menjelaskan tentang bagaimana pariwisata di Indonesia dan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pariwisata di Indonesia. Adapun penjelasan pariwisata menurut undang-undang tersebut adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Dunia pariwisata melibatkan manusia dari berbagai segmen, sehingga pariwisata dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan.¹¹

Penjelasan kepariwisataan menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Menurut E. Guyer Freuler menjelaskan bahwa pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan pada kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan rasa cinta terhadap keindahan alam dan khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan.

Menurut Salah Wahap menjelaskan tentang pariwisata merupakan suatu

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beranekaragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya.¹²

2.4. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menemukan beberapa penelitian yang selaras dengan kajian ini, beberapa kepustakaan yang berisi uraian dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di berbagai tempat yang telah dilakukan penelitian dan sudah dapat dipertanggung jawabkan hasil penelitian tersebut sebagai sebuah karya ilmiah. Berikut merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1.
Penelitian yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tiara Nur Tsofyani Putri, Hartuti Purnaweni dan	Implementasi Program Kelompok Sadar - Wisata (POKDARWIS) di Kelurahan Kandri,	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara posisi, peran dan potensi masyarakat Kelurahan

¹² Andi mussaddad Mukhlis, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar* (Makassar: Repository UNHAS, 2021).

	Margaretha Suryaningsih	Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. (2015)	implementasi kegiatan Pokdarwis terutama di Pokdarwis Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.	Kandri dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program. Masyarakat bukanlah objek pelaksanaan, tetapi subjek, dengan begitu masyarakat akan merasakan dorongan untuk berpartisipasi dalam program karena sesuai dengan kehidupan mereka yang daerah tersebut.
2	Putri Regina Biana	berjudul Implementasi Program POKDARWIS dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu). (2017)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program POKDARWIS dalam meningkatkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Baru	Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi POKDARWIS dalam mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan sebagai penunjang pariwisata di Desa Punten, serta perlu pedampingan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah guna

				meningkatkan kesadaran masyarakat pariwisata.
3	Triana Mukti Trisnoasih dan Turtiantoro	Pemberdayaan Masyarakat: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sebagai Motor Penggerak Pariwisata di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Guci Kabupaten Tegal. (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata, peran Pokdarwis selama ini dan menganalisa faktor-faktor penghambat dan peluang pemberdayaan masyarakat dan pergerakan Pokdarwis Guci.	Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan oleh berbagai pihak, untuk kepariwisataan terutama dalam penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dari pemerintah melakukan kerjasama dan pembinaan pedagang serta dukungan lainnya. Hambatan pemberdayaan dan pergerakan Pokdarwis yaitu kelembagaan Pokdarwis lemah, ketertinggalan masyarakat Guci, partisipasi masyarakat yang masih kurang, orientasi paradigma lama pemberdayaan, perhatian dari pemerintah belum

				maksimal dan penyuluhan kepada masyarakat masih kurang.
--	--	--	--	---

Penelitian berjudul "*Implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya*" memiliki persamaan dengan penelitian Tiara Nur Tsofyani Putri dkk. (2015), Putri Regina Biana (2017), serta Triana Mukti Trisnoasih dan Turtiantoro (2019) dalam hal fokus kajian terhadap implementasi program Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata berbasis komunitas. Kesamaan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di daerah masing-masing. Dalam konteks Aceh Jaya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif sebagai subjek dalam pengembangan pariwisata, sejalan dengan temuan Tiara Nur Tsofyani Putri dkk. di Kelurahan Kandri, yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi Pokdarwis.

Namun, perbedaannya terletak pada tantangan dan kondisi geografis yang khas di Aceh Jaya. Jika di Desa Punten Kota Batu menurut Putri Regina Biana masih diperlukan pembangunan infrastruktur dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, maka di Aceh Jaya, tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung wisata akibat dampak bencana alam yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian Triana Mukti Trisnoasih di DTW Guci Kabupaten Tegal, yang lebih menyoroti

lemahnya kelembagaan Pokdarwis dan partisipasi masyarakat yang masih rendah akibat paradigma lama dalam pemberdayaan. Di Aceh Jaya, upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Pokdarwis juga dilakukan, tetapi tingkat dukungan dan keberlanjutan program masih memerlukan perhatian lebih, mirip dengan permasalahan yang ditemukan di penelitian sebelumnya. Secara keseluruhan, penelitian di Aceh Jaya menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam strategi pemberdayaan, implementasi Pokdarwis di setiap daerah memiliki tantangan spesifik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah.



2.4. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. “Dalam penelitian ini, peneliti harus memiliki kemampuan pengetahuan yang luas dan cerdas didalam mengguraikan hasil-hasil penelitian dari objek penelitian melalui wawancara secara mendalam.”¹³

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dapat mengetahui bagaimana Implementasi Pokdarwis di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya dan mengetahui Kendala apa saja dalam Implementasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya.

3.2. Fokus penelitian

Menurut Sugiyono, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari suatu kondisi/situasi

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Repository UMA, 2022).

sosial. Dapat dipahami bahwa fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup dari sebuah penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk menentukan kemana arah penelitiannya. Berikut merupakan fokus penelitian yang sudah peneliti tentukan.

**Tabel 3.1.
Fokus Penelitian**

Dimensi	Indikator	Sumber
1. Bagaimana Implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya?	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka belajar, Yogyakarta, 2011.
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya?		

Sumber: Data diolah tahun 2024

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat Implementasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Aceh Jaya adalah di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora)

Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di JL. Pertiwi, No. 4, Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2023 di Kabupaten Aceh Jaya, terkhusus di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data untuk mendukung penelitian yang ingin dikaji oleh peneliti, yakni data primer dan data sekunder. Berikut adalah uraian mengenai sumber data tersebut.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, Data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti berdasarkan dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, Data sekunder yakni data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian didapatkan oleh peneliti adalah melalui buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang selaras dengan penelitian.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018)

3.5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni dengan mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu dengan tugas pokok dan fungsi yang semestinya. Perihal ini dipertimbangkan agar subjek penelitian dapat memberikan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya.	1 Orang
2	Kepala Bidang Pariwisata	1 Orang
3	1. Pokdarwis Pantai Nisero 2. Pokdarwis Pasie Luah 3. Pokdarwis Wisata Lestari 4. Pokdarwis Konservasi Penyu 5. Pokdarwis Pantai Panorama	5 Orang
4	1. Wisatawan Lokal 2. Wisatawan Lokal 3. Wisatawan Lokal	3 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Data diolah tahun 2024

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam suatu penelitian yang diteliti, hal mendasar dalam penelitian adalah mengumpulkan data penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data tersebut meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun uraian tentang teknik penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti terhadap objek penelitiannya. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati apa yang dilakukan, mengamati aktivitas pariwisata di beberapa destinasi, dan juga ikut ambil andil dalam aktivitas mereka.

2. Wawancara

Menurut Jusuf Soewadji, wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi mendalam atau data dari informan melalui proses wawancara langsung antara *interviewer* dan *interviewee*.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipercaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, jurnal, arsip, tulisan, angka,

¹⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)

dokumen, gambar dan video yang berupa laporan keterangan yang dapat mendukung penuh penelitian.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk mempertanggungjawabkan suatu hasil penelitian dan agar dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. *Credibility* (Kredibilitas) merupakan suatu teknik untuk menguji suatu kepercayaan dari data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti, data tersebut meliputi perpanjangan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tekun dalam melakukan penelitian, dan diskusi dengan orang yang mendukung analisis penelitian dengan tujuan penelitian ini tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.
2. *Dependability* (Reliabilitas) adalah suatu penelitian yang reliable, yakni apabila orang lain mengulangi penelitian ini dengan proses yang sama maka akan pula hasilnya.
3. *Confirmability* (Konfirmasi) merupakan hasil penelitian yang disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang, konfirmasi dapat dilakukan bersamaan dengan reliabilitas. Konfirmasi berarti menguji hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Sejarah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.

Pembentukan Disparekrafpora merupakan bagian dari pelaksanaan amanat reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, khususnya di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga. Dinas ini menjadi unsur pelaksana pemerintahan daerah dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar non-pendidikan, sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Sebagai perangkat daerah, Disparekrafpora memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di empat sektor utama:

1. Pariwisata, yang mencakup promosi dan pengembangan destinasi lokal;

2. Ekonomi Kreatif, yang diarahkan untuk mendorong inovasi dan industri kreatif berbasis kearifan lokal;
3. Kepemudaan, sebagai upaya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda;
4. Olahraga, yang fokus pada pengembangan prestasi dan pembudayaan olahraga di masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan program dan arah kebijakan strategis, Disparekrafpora menyusun dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023–2026. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dinas selama periode empat tahun.¹⁶

4.1.2. Visi Misi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya

Visi:

“Mewujudkan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya yang Sehat, Kejayaan, Agama, Tangguh, Infrastruktur dan Informatika (Gerbang Raja Sejati).”

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan enam misi utama sebagai berikut:

¹⁶ Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023–2026

1. Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan hingga menjangkau rumah masyarakat.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi mikro dan memperluas akses terhadapnya, guna mendorong kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor PDRB.
3. Meningkatkan kejayaan agama melalui pengembangan pendidikan agama Islam dan penyediaan fasilitas sarana ibadah.
4. Mengembangkan pembangunan yang tangguh di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, mitigasi bencana, dan pelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan mutu pendidikan umum dan kejuruan, serta memperkuat pembinaan pemuda, olahraga, dan kebudayaan.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip transparansi, efektivitas, demokrasi, dan akuntabilitas.¹⁷

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2021, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafpora) memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada Kabupaten Aceh Jaya.

¹⁷ *Ibid*

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Disparekrafpora menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

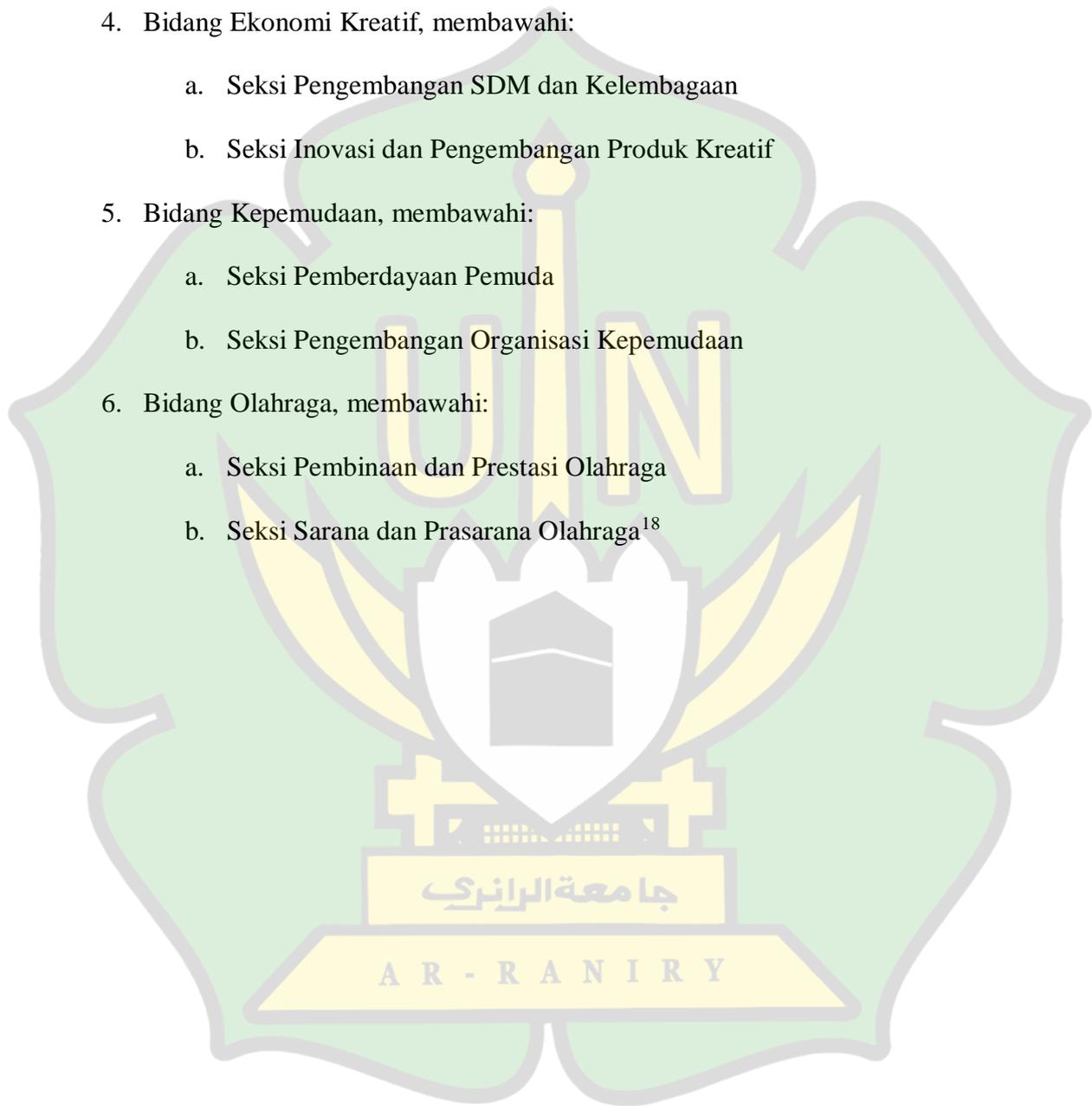
1. Penyusunan kebijakan di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas kegiatan dan program di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas, termasuk pelayanan umum dan pengelolaan keuangan serta aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Disparekrafpora dirancang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Struktur ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pariwisata, membawahi:
 - a. Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata
 - b. Seksi Promosi dan Kerja Sama Pariwisata
4. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan
 - b. Seksi Inovasi dan Pengembangan Produk Kreatif
5. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - b. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan
6. Bidang Olahraga, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Prestasi Olahraga
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga¹⁸



¹⁸ *Ibid*

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan, pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program Sadar Wisata.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan serta pengembangan destinasi wisata di daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Aceh Jaya, kebijakan Sadar Wisata menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat peran masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata yang ramah, bersih, tertib, dan bertanggung jawab. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, hingga struktur birokrasi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kebijakan Sadar Wisata ini diimplementasikan di Aceh Jaya dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan lapangan, pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi alam yang besar, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya kehadiran pemandu wisata (tour guide) yang seharusnya menjadi jembatan informasi antara wisatawan dan objek wisata lokal. Selain itu, aktivitas pariwisata di wilayah ini cenderung hanya ramai pada akhir pekan atau hari-hari besar nasional, yang menunjukkan belum

adanya pengelolaan terpadu dan strategi promosi berkelanjutan untuk menarik wisatawan setiap hari. Kondisi ini diperburuk dengan masih kurangnya fasilitas umum di berbagai destinasi wisata, seperti toilet, tempat ibadah, tempat sampah, hingga tempat peristirahatan yang layak. Hal ini tentu berdampak pada kenyamanan pengunjung dan menurunkan daya tarik destinasi.

Aksesibilitas ke lokasi wisata juga menjadi kendala serius. Beberapa destinasi potensial seperti Sadar Lestari, Ceureceu Embon, destinasi wisata Ie Jeureungeh, kawasan konservasi penyu, dan Pantai Nisero masih sulit dijangkau akibat kondisi jalan yang buruk. Infrastruktur jalan yang rusak atau belum taspal menyulitkan wisatawan, terutama yang berasal dari luar daerah, untuk mengakses tempat-tempat tersebut. Di sisi lain, informasi mengenai destinasi wisata di Aceh Jaya masih sulit ditemukan, baik secara daring maupun melalui media informasi lokal. Minimnya promosi serta ketiadaan sistem informasi yang memadai membuat banyak destinasi belum dikenal secara luas, bahkan oleh masyarakat lokal sendiri.

Lebih parah lagi, beberapa destinasi unggulan seperti Pasie Saka dan Pantai Kuala Bakong mengalami penutupan total tanpa adanya kejelasan informasi, yang tentu saja menimbulkan kebingungan dan kekecewaan bagi wisatawan. Ditambah lagi, hampir tidak ada rambu atau papan informasi yang menjelaskan arah dan deskripsi tempat wisata, sehingga wisatawan kesulitan untuk mencapai lokasi secara mandiri. Secara keseluruhan, potensi besar sektor pariwisata Aceh Jaya belum diiringi dengan dukungan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan yang memadai. Diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan sektor ini secara terarah dan berkelanjutan.

Gambar 4.1.
Kondisi Jalan Wisata Ie Jeureungeh



Gambar 4.2.
Anggaran Disparekrافتora Aceh Jaya Tahun 2023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023 Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			Jumlah Pendapatan Rp0
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI			Rp6.177.252.546
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp2.519.146.552
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp1.843.405.994
5 1 05	Belanja Hibah			Rp1.814.700.000
5 2	BELANJA MODAL			Rp1.415.457.918
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp168.167.918
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp1.247.290.000
Jumlah Belanja				Rp7.592.710.464
Total Surplus/(Defisit)				(Rp7.592.710.464)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Calang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA JUANDA, S.Pd., M.Pd NIP: 197806162003121006 Mengesahkan, PPKD SAERUL MARYADI, SE.Ak., M.A.P. NIP: 197203272002121003
Januari	Rp0	Januari	Rp394.234.309	
Februari	Rp0	Februari	Rp402.084.109	
Maret	Rp0	Maret	Rp2.482.261.029	
April	Rp0	April	Rp1.101.601.361	
Mei	Rp0	Mei	Rp787.082.879	
Juni	Rp0	Juni	Rp270.791.311	
Juli	Rp0	Juli	Rp1.300.419.080	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp315.054.155	
September	Rp0	September	Rp216.379.480	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp224.843.351	
November	Rp0	November	Rp96.145.000	
Desember	Rp0	Desember	Rp1.814.400	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp7.592.710.464	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RAHMAD FUADI, ST, MT	198405072010031001	Kabag. Adm. Pembangunan pada Setdakab	
2.	MUNDZIR ABBAS, SST.Mar	198202232011031001	Kabid. Program, Dalev & Pemb. Daerah pada Bappeda	
3.	SURIADI BEN SUUD, SH	198309282009041003	Kabid. PP. Keist. Aceh, Pem & SDM Pada BAPPEDA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	RAHMAD RAMADHAN, SP, M.Si	198206302006041005	Kabid. PP. Ekonomi & SDA pada BAPPEDA	
5.	HERI GUNAWAN, ST, MT	198106102006041009	Kabid PP. Infrastruktur & Kewilayahan pada BAPPEDA	
6.	KHAIRUDDIN, SE	198101182006041010	Kabid. Anggaran pada BPKK Aceh Jaya	
7.	MULYADI, SE	197810092005041001	Kabid. Aset pada BPKK Aceh Jaya	
8.	YVES RIZAL, SE	198005092001121006	Kabid. Perbendaharaan pada BPKK Aceh Jaya	

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya, peneliti melakukan wawancara langsung dengan sejumlah pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait proses pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta persepsi para pelaksana dan masyarakat terhadap efektivitas program Kelompok Sadar Wisata. Dengan pendekatan ini, diharapkan analisis yang disajikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Berikut ini adalah pemaparan hasil wawancara dengan para informan kunci yang terdiri dari pihak Disparekrafora Aceh Jaya, Kelompok Sadar Wisata, serta anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sadar wisata.

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward, komunikasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Artinya, agar sebuah kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik, semua pihak yang terlibat, terutama pelaksana di lapangan harus memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan apa hasil yang diharapkan. Jika informasi tersebut tidak disampaikan dengan baik, bisa terjadi kesalahpahaman atau bahkan pelaksanaan yang menyimpang dari maksud awal kebijakan. Komunikasi yang tidak jelas bisa menyebabkan informasi “terputus di tengah jalan” atau disalahartikan oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dalam konteks Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Aceh Jaya, komunikasi ini sangat penting. Pokdarwis merupakan ujung tombak di lapangan dalam menjalankan program Sadar Wisata. Jika mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami dari pihak pemerintah, seperti dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan Dan Olahraga (Disparekrafpora) maka mereka akan kesulitan untuk menjalankan perannya. Misalnya, jika tidak ada penjelasan yang jelas mengenai bagaimana Pokdarwis harus mengelola potensi wisata di desa mereka, apa indikator keberhasilan program, atau bentuk kegiatan apa yang harus dilakukan, maka pelaksanaan kebijakan bisa menjadi tidak terarah.

Sebaliknya, jika komunikasi dari pemerintah kepada Pokdarwis berjalan dengan baik melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan secara berkala maka mereka akan lebih siap dalam melaksanakan peran mereka. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan wisata yang bersih, aman, tertib, dan ramah. Komunikasi yang efektif juga akan memudahkan koordinasi antar pihak, serta meminimalkan terjadinya

konflik atau kebingungan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan program kelompok sadar wisata ini, tentu kami komunikasikan dengan semua pihak terkait yang ada didesa-desa yang memiliki pontensi wisatanya, hal itu sudah saya lakukan dari dulu-dulu, komunikasi tersebut dihadiri oleh aparatur desa, Bumdesnya dan kelompok-kelompok wisata yang ada di desa tersebut, karena kami merasa memang dengan komunikasilah semua kebijakan atau program itu bisa berlangsung dengan terarah, misalnya apa yang diperlukan untuk menunjang tempat wisata tersebut agar bisa maju, dengan adanya masukan itu, kita sebagai dinas terkait akan mensupport kegiatan tersebut”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya dapat dipahami bahwa komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya menyampaikan bahwa dalam menjalankan program ini, komunikasi dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak yang terlibat di tingkat desa, terutama di desa-desa yang memiliki potensi wisata. Komunikasi tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga partisipatif, melibatkan aparatur desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kelompok-kelompok wisata lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan keyakinan bahwa melalui komunikasi yang terbuka dan terarah, setiap kebijakan atau program dapat dijalankan secara efektif. Selain sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk menghimpun masukan dari masyarakat terkait kebutuhan dan potensi pengembangan destinasi wisata.

¹⁹ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

Selanjutnya, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya, juga menambahkan pernyataannya, bahwa:

“Disparekrafpora melakukan komunikasi dalam bentuk lain juga, seperti melakukan pelatihan peningkatan pariwisata, mensosialisasikan ketentuan atau kebijakan dengan cara mengundang Pokdarwis pada tahun 2023 ke pendopo Bupati dalam agenda bincang pariwisata di Rumoh Rakyat, yang kami undang untuk desa yang Pokdarwisnya aktif dengan tujuan agar mereka memahami bagaimana cara menjalankannya, dan kami juga turun ke desa untuk membentuk Pokdarwis itu, tujuan-tujuan dari komunikasi ini sangatlah besar untuk bisa meningkatkan kunjungan para wisatawan ke Kabupaten Aceh Jaya, karena dengan cara itu kita bisa meningkat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Jaya”²⁰

Gambar 4.3.
Pelatihan Manajemen Pariwisata



Sumber: Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dengan Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya dapat dipahami bahwa Disparekrafpora Kabupaten Aceh Jaya memaksimalkan peran komunikasi dalam implementasi kebijakan Sadar Wisata melalui berbagai pendekatan strategis. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara verbal atau

²⁰ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

melalui penyampaian informasi tertulis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas di bidang kepariwisataan serta kegiatan sosialisasi kebijakan. Dalam hal ini, Pokdarwis dari desa-desa yang sudah terbentuk diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut agar memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung program Sadar Wisata.

Selain itu, Disparekrafpora juga secara aktif turun langsung ke desa-desa yang belum memiliki Pokdarwis guna membentuk dan membina kelompok tersebut dari awal. Seluruh bentuk komunikasi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Harapannya, melalui strategi komunikasi yang menyeluruh ini, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat, seiring dengan berkembangnya kualitas dan daya tarik destinasi wisata yang ada di daerah tersebut.

Kemudian, Kepala Bidang Pariwisata juga menyampaikan pernyataan yang senada dengan Kepala Dinas, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau komunikasi yang kita lakukan kami rasa sudah baik ya, karena kami koordinasi dengan semua Pokdarwis di Kabupaten Aceh Jaya, kami dari dinas akan memantau apa yang telah dilakukan oleh Pokdarwis dan juga melihat potensi destinasi wisata yang ada disini, kemudian pasti ada komunikasi dengan semua pihak terkait, media informasi juga kita minta kerjasamanya untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Jadi dari segi komunikasi ini, kami meyakini bahwa menjalankan komunikasi yang baik dengan atasan atau bawahan, karena menurut saya tanpa komunikasi maka tidak akan berjalan program pengembangan tempat wisata”²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kabid Pariwisata Disparekrafpora Kabupaten Aceh Jaya dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan elemen penting dalam

²¹ Wawancara Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora pada tanggal 06 Maret 2025

mendukung keberhasilan program pengembangan pariwisata, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Sadar Wisata. Berdasarkan wawancara, disampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan selama ini telah berjalan dengan baik, ditunjukkan melalui koordinasi rutin antara dinas dengan seluruh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah tersebut. Disparekrafpora secara aktif memantau aktivitas Pokdarwis sekaligus mengidentifikasi potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan.

Selain itu, komunikasi juga dijalin dengan berbagai pihak terkait, termasuk media informasi, guna mendukung promosi destinasi wisata Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini mencerminkan bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan secara vertikal dengan atasan atau bawahan, tetapi juga bersifat horizontal dengan seluruh pemangku kepentingan. Kabid Pariwisata Disparekrafpora Aceh Jaya juga menekankan bahwa tanpa adanya komunikasi yang efektif, program pengembangan pariwisata tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, komunikasi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun sinergi dan kolaborasi untuk kemajuan sektor pariwisata daerah.

Selanjutnya, Sekretaris Pokdarwis Pantai Panorama Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee juga menjelaskan kepada peneliti saat melakukan wawancara di lapangan, ia menyebutkan bahwa:

“Kami selaku mempromosikan tempat wisata di gampong ini, kan kami ada pantai yang indah serta menyediakan wahana yang bisa di nikmati oleh pengunjung dan juga *home stay* berbasis masyarakat yang diberikan dari dinas parekrafpora, jadi kami memanfaatkan itu untuk meningkatkan pengunjung kesini, kami biasa komunikasi langsung di grup wa, atau juga kirim pesan pribadi bila ada kendala, kalau untuk pertama kemarin, memang kami rutin untuk berkomunikasi dengan dinas dan juga para aparatur gampong disini”²²

²² Wawancara Sekretaris Pokdarwis Pantai Panorama Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee pada tanggal 10 Maret 2025

Gambar 4.4.
Pelatihan *Home Stay*



Sumber: <https://disparekrafpora.acehjayakab.go.id/>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Pokdarwis Pantai Panorama Desa Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee dapat dipahami bahwa Kelompok Sadar Wisata di tingkat gampong turut aktif dalam mempromosikan potensi wisata yang dimiliki daerahnya. Salah satu bentuk konkret dukungan dari Disparekrafpora adalah pemberian fasilitas wisata seperti banana boat dan *home stay* yang kemudian dimanfaatkan oleh Pokdarwis untuk menarik lebih banyak pengunjung ke objek wisata pantai di wilayah tersebut. Dalam menjalankan perannya, komunikasi antara Pokdarwis dengan pihak dinas maupun aparat gampong berlangsung secara langsung dan intensif.

Media komunikasi yang digunakan cukup beragam, mulai dari grup WhatsApp hingga pesan pribadi, yang menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi ataupun menyelesaikan kendala yang muncul di lapangan. Pada tahap awal pelaksanaan program, komunikasi dilakukan secara rutin, menandakan adanya koordinasi yang terstruktur antara pihak pelaksana di lapangan dan pihak pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa

komunikasi yang baik telah menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program Sadar Wisata di tingkat desa.

Selanjutnya, salah satu pengunjung dari Pantai Panorama, Desa Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee menyampaikan kepada peneliti bahwa:

“Saya datang kesini bersama keluarga, jadi saya tahu tempat ini itu sudah lama, karena saya bukan asli orang sini, jadi kemudian ada sodara saya yang pernah kesini untuk rekreasi keluarga, kemudian menyampaikan kepada saya untuk datang ke pantai panorama, karena disini sudah ada banana boat nya, makanya saya dan keluarga memutuskan untuk kesini, jadi sebelumnya saya juga pernah melihat juga video di Instagram dan tiktok bahwa memang betul disini ada wahana seperti banana boat di laut”

Gambar 4.5.

Penyerahan Banana Boat Di Pantai Panorama Desa Pantan Makmur



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pengunjung dari Pantai Panorama, Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee dapat dipahami bahwa keberadaan tempat wisata tersebut melalui rekomendasi dari saudaranya yang sebelumnya pernah berkunjung untuk kegiatan rekreasi keluarga. Meski bukan berasal dari daerah setempat, pengunjung tersebut tertarik untuk datang bersama keluarganya setelah mendengar informasi mengenai wahana banana boat yang tersedia di pantai tersebut. Selain itu, ia juga sempat melihat video promosi Pantai Panorama melalui media sosial Instagram, yang semakin meyakinkannya untuk berkunjung. Kehadiran wahana permainan air menjadi daya tarik utama bagi wisatawan keluarga, dan promosi melalui media sosial terbukti efektif dalam menarik perhatian pengunjung dari luar daerah.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, tersedianya sumber daya yang memadai menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Menurut pandangan George C. Edward, meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi tetap tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut mencakup tidak hanya finansial, tetapi juga sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas teknis dari para pelaksana di lapangan.

Implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya menjadi penopang utama bagi upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan ini membutuhkan dukungan dari tenaga yang kompeten dalam bidang pariwisata, serta alokasi dana yang cukup untuk menjalankan program-program pelatihan, promosi, dan pengelolaan destinasi wisata. Oleh karena itu, penting

untuk menelaah sejauh mana ketersediaan sumber daya yang ada telah mampu menunjang jalannya kebijakan Kelompok Sadar Wisata di daerah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk sumber daya, kami memiliki sumber daya manusia yang cukup bagus, karena pokdarwis ini memang rata-rata dikelola oleh pemuda setempat yang ada di desa tersebut, mereka memiliki semangat tinggi dalam merawat destinasi wisatanya, kemudian sampai saat ini disparekrafpora terus membentuk kader dan kesiapan pokdarwis untuk meningkatkan kemajuan pariwisata di aceh jaya, disparekrafpora sudah banyak melakukan pembekalan, pelatihan hingga tour ke lokasi wisata yang sudah berkembang seperti ke sabang kemarin, kita membawa ketua pokdarwisnya untuk tour ke Iboih pada november 2024 kemarin untuk melihat bagaimana manajemen pariwisata di sana. Dan hampir semua pokdarwis yang ter-SK-kan oleh disparekrafpora di bawah bidang pariwisata telah siap menyambut PORA Aceh Jaya di 2026 nanti, Disparekrafpora selalu mempersiapkan anak-anak muda Aceh Jaya untuk bergerak terus tanpa henti untuk membawa pariwisata aceh jaya ke tingkat yang lebih tinggi, disparekrafpora banyak menggelar kegiatan pengembangan, pembekalan serta pelatihan seperti, manajemen pariwisata, pelatihan konten creator dan animasi, pelatihan manajemen homestay, pelatihan promosi, pelatihan tata boga, pelatihan durian, pelatihan ekonomi kreatif dan ada lain lagi”²³

Selanjutnya, beliau juga menambahkan pernyataannya saat peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai sumber daya anggaran, bahwa:

“Sejauh ini pendanaan untuk operasional pokdarwis tidak ada, pokdarwis berkolaborasi dengan bumdes bidang pariwisata untuk menjalankan destinasinya, untuk oprasional dan kebersihan destinasi hanya mengandalkan biaya masuk destinasi atau kutipan dari penjual di lokasi destinasi, tetapi kami memberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan oleh mereka sebagai pengelola tempat wisata dan bisa meningkatkan daya tarik pengunjung”²⁴

²³ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

²⁴ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

Gambar 4.6.
Pelatihan Tata Boga 2024



Sumber: <https://acehjayapost.com/disparkrafpora-aceh-jaya-gelar-pelatihan-tata-boga/>

Gambar 4.7.
Pelatihan Animator dan konten kreator 2024



Sumber: <https://bacaberita.co/disparkrafpora-kabupaten-aceh-jaya-mendorong-penguatan-ekosistem-konten-digital-melalui-pelatihan-animator-dan-konten-kreator/>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya dan dokumentasi di atas dapat dipahami bahwa implementasi Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya, aspek sumber daya manusia telah menjadi fokus utama yang mendapat perhatian serius dari Disparekrafpora. Pokdarwis di setiap desa umumnya dikelola oleh para pemuda setempat yang memiliki semangat tinggi dan kepedulian terhadap pengembangan destinasi wisata di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki cukup potensial untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata.

Disparekrafpora secara aktif berperan dalam membentuk dan membina kader-kader Pokdarwis melalui berbagai kegiatan penguatan kapasitas, mulai dari pembekalan, pelatihan teknis, hingga studi banding ke daerah yang telah lebih maju dalam pengelolaan wisata, seperti Sabang. Selain itu, Disparekrafpora juga mempersiapkan seluruh Pokdarwis yang telah disahkan melalui SK untuk menyambut perhelatan PORA Aceh Jaya 2026 sebagai salah satu momentum strategis dalam memajukan pariwisata lokal. Berbagai program pelatihan seperti manajemen pariwisata, konten kreator, animasi, manajemen homestay, promosi, kerajinan tangan, hingga pelatihan ekonomi kreatif dan pengelolaan durian menjadi bukti nyata bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan di Aceh Jaya.

Aspek pendanaan masih menjadi tantangan dalam operasional Pokdarwis di Kabupaten Aceh Jaya. Hingga saat ini, tidak tersedia alokasi anggaran khusus untuk menunjang operasional Pokdarwis secara langsung. Untuk menjlankannya, Pokdarwis menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Gampong (Bumdes), khususnya di bidang pariwisata, guna mendukung pengelolaan destinasi. Sumber pembiayaan operasional serta

kegiatan pemeliharaan seperti kebersihan kawasan wisata sebagian besar berasal dari kontribusi lokal, antara lain melalui biaya masuk destinasi atau kutipan sukarela dari pedagang yang berjualan di area tersebut. Meskipun tidak berupa dana tunai, Disparekrafpora tetap memberikan dukungan dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas pengelolaan dan sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata oleh komunitas lokal.

Selanjutnya Kepala Bidang Pariwisata juga menyampaikan pernyataan yang senada dengan Kepala Dinas, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami disini di Aceh Jaya bila dilihat dari sumber daya sudah hampir memadai ya, sumber daya alam bagus, sumber daya manusia akan terus kami berikan edukasi dari segi pelatihan dan sosialisasi program terhadap pengurus Pokdarwis, memang ada kendalanya sedikit di sisi anggaran, apalagi di tahun ini adanya banyak pemotongan anggaran, tetapi hal yang bisa kami lakukan akan terus dijalankan dalam upaya meningkatkan destinasi wisata disini, kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak agar terus membaik kedepannya, pelatihan dan program edukasi lainnya tetap kami usahakan untuk menunjang Pendidikan bagi pengurus pokdarwis di desa-desa yang ada di kabupaten Aceh Jaya”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora Aceh Jaya dapat dipahami bahwa Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi sumber daya yang cukup memadai, khususnya dari sisi sumber daya alam yang dianggap sangat mendukung pengembangan pariwisata. Dari sisi sumber daya manusia, upaya peningkatan terus dilakukan oleh pihak terkait melalui pelatihan dan sosialisasi program kepada pengurus Pokdarwis di berbagai desa. Meskipun terdapat tantangan pada aspek pendanaan, terutama akibat pemotongan anggaran pada tahun berjalan, pihak terkait tetap berkomitmen

²⁵ Wawancara Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora pada tanggal 06 Maret 2025

menjalankan program-program yang mampu menunjang kemajuan sektor pariwisata. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan edukasi bagi para pelaku pariwisata lokal agar mampu mendorong perkembangan destinasi wisata di Aceh Jaya.

Kemudian, Ketua Pokdarwis dari Pantai Nisero, Desa Kede Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya juga menjelaskan kepada peneliti bahwa:

“Dalam menjaga destinasi pantai disini kami bekerja sama semuanya antar perangkat desa disini, dan kami juga dipanggil oleh dinas pariwisata Ketika adanya sosialisasi dan pengarahan terkait pengembangan dan juga diberikan arahan tentang bagaimana kami menjaga pantai nisero ini, dan juga kami diberikan tenda camping untuk mendukung jalannya program kami disini, ya kami melakukan ini untuk mempromosikan tempat wisata di desa kami, semoga dengan itu juga membantu perekonomian masyarakat disekitar ini, tapi kalo untuk anggaran khusus dari dinas itu tidak ada, jadi kebanyakannya dari dana desa”²⁶

Dari hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis dari Pantai Nisero, Desa Kede Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dapat dipahami bahwa Dalam upaya menjaga dan mengembangkan destinasi wisata Pantai Nisero, pihak pengelola di tingkat desa menjalankan kerja sama yang erat dengan perangkat desa serta mendapatkan dukungan dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora). Mereka secara aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan pengarahan yang diselenggarakan oleh dinas, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta arahan mengenai cara pengelolaan dan pelestarian kawasan wisata.

Selain itu, bentuk dukungan juga diwujudkan dalam penyediaan fasilitas seperti tenda camping secara gratis guna mendukung aktivitas wisata di lokasi tersebut. Upaya promosi

²⁶ Wawancara Ketua Pokdarwis Pantai Nisero, Desa Kede Tuha, Kecamatan Panga pada tanggal 15 Maret 2025

dan pengelolaan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Meski begitu, dukungan anggaran langsung dari dinas belum tersedia, sehingga sebagian besar pembiayaan berasal dari alokasi dana desa.

3. Disposisi

Disposisi merupakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Menurut George C. Edward, disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan integritas yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan terhadap partisipasi. Disposisi ini akan sangat menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Bahkan dengan komunikasi yang jelas dan sumber daya yang memadai, tanpa adanya kemauan dan sikap positif dari para implementor, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan.

Dalam Implementasi kebijakan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya, disposisi para pelaksana di tingkat daerah dan komunitas lokal menjadi kunci dalam menumbuhkan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan yang baik dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana sikap dan karakter pelaksana kebijakan mendukung keberhasilan program ini di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Sikap dan komitmen kami itu tetap sama, dan kami antara pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kemauan bersama untuk memajukan Aceh Jaya, jadi

dasarnya itu mereka yang telah kami berikan SK memiliki komitmen yang jelas dan kami selalu memberikan semangat untuk Pokdarwis yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk tetap optimis dengan jalan dipilih, dan mereka juga memiliki semangat yang sama untuk memajukan destinasi wisata di desa mereka. Pokdarwis ini dihuni oleh banyak pemuda-pemuda yang memiliki ide-ide kreatif untuk memajukan daerah wisata yang mereka kelola, jadi mereka memiliki sikap yang jelas dan memiliki tanggung jawab juga untuk mempromosikan, membersihkan area wisata yang mereka agar dapat menarik pengunjung yang akan datang ke tempat wisata mereka”²⁷

Dari hasil wawancara diatas dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya dapat dipahami bahwa sikap dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya. Kedua pihak menunjukkan semangat kolaboratif yang tinggi, ditandai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) kepada pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai bentuk legitimasi sekaligus dorongan untuk terus berkontribusi aktif. Pokdarwis yang tersebar di berbagai desa diisi oleh para pemuda yang memiliki kreativitas dan tanggung jawab dalam mengelola serta mempromosikan destinasi wisata. Pokdarwis juga turut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata guna meningkatkan daya tarik bagi para pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, khususnya Pokdarwis, menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Aceh Jaya.

Selanjutnya, Ketua Pokdarwis Pasie Luah, Desa Dayah Baroe, Kecamatan Krueng Sabee juga menyatakan kepada peneliti, bahwa:

“Kami dari kelompok sadar wisata Pasie Luah sangat bertanggung jawab atas kejadian-kejadian di Pasie Luah, karena saya selaku ketua mendapatkan Amanah dari

²⁷ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

desa yang kemudian nama-nama kami diberikan ke Disparekrafpora untuk bertanggung jawab menjalankan arahan dari sana supaya destinasi pantai pasie luah lebih bagus, saya sangat komit dengan urusan disini, saya dan kawan-kawan juga memantau area pantai disini”²⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pokdarwis Pasie Luah, Desa Dayah Baroe, Kecamatan Krueng Sabee dapat dipahami bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pasie Luah menyampaikan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dan menjaga kawasan wisata Pantai Pasie Luah. Ia mengungkapkan bahwa amanah yang diberikan oleh pihak desa serta pengukuhan nama-nama pengurus Pokdarwis oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) menjadi landasan moral bagi dirinya dan tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh komitmen. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada menjalankan arahan dari pemerintah, tetapi juga mencakup pemantauan langsung terhadap kondisi destinasi wisata. Hal ini menunjukkan bahwa Pokdarwis Pasie Luah memiliki sikap dan tanggung jawab yang kuat dalam menjaga kualitas serta keberlangsungan destinasi wisata agar tetap menarik dan berkembang.

Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora juga menyampaikan pernyataan yang senada dengan Kepala Dinas, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau sikap kami jelas ya, disparekrafpora itu mendukung dengan jelas dan berkomitmen untuk menjalankan tugas kami di bidang pariwisata salah satunya, maka dari itu tugas dan tanggung jawab kami itu memang sudah jelas, dan kami berkoordinasi langsung dengan mereka di Pokdarwis masing-masing, komunikasi bisa langsung dan via Wa, bila ada masalah disana langsung di komunikasikan, jadi komunikasi itu rutin kami jalankan, mereka pun saya lihat juga begitu komitmen dalam mempromosikan”²⁹

²⁸ Wawancara Ketua Pokdarwis Pasie Luah, Desa Dayah Baroe, Kecamatan Krueng Sabee pada tanggal 12 Maret 2025

²⁹ Wawancara Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora pada tanggal 06 Maret 2025

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora dapat dipahami bahwa sikap tegas dan jelas dari pihak Disparekrafpora dalam mendukung serta menjalankan tugas di bidang pariwisata. Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang aktif dan berkelanjutan dengan setiap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa-desa. Bentuk komunikasi yang dilakukan pun beragam, mulai dari tatap muka langsung hingga melalui media digital seperti WhatsApp, yang mempermudah respons terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Komunikasi ini dijalankan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran implementasi kebijakan. Selain itu, terlihat pula bahwa Pokdarwis memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan perannya, khususnya dalam hal mempromosikan destinasi wisata di wilayah masing-masing.

Kemudian, Ketua Pokdarwis Sadar Lestari Desa Ie Jereungeh menyebutkan, bahwa:

“Kami memiliki komitmen untuk mengembangkan wisata disini, hal-hal yang kami lakukan adalah memberikan informasi kepada wisatawan melalui media-media yang ada, kami disini alhamdulillah ada wisata alam, disini juga ada homestay bagi pengunjung yang ingin menginap dan menikmati keindahan alam, homestay itu diberikan oleh Pemerintah Aceh Jaya dengan harapan memberikan dampak yang baik untuk desa wisata kami disini”

Gambar 4.8.
Pokdarwis Sadar Lestari Desa Ie Jereungeh Kabupaten Aceh Jaya



Selanjutnya, salah satu wisatawan lokal mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Kami merasa nyaman saat datang ke wisata lestari ini, pelayanan dari pihak disini itu begitu ramah dan juga ada penjagaan disini di area homestay ini, jadi kami merasa aman saat berkunjung kesini, tempatnya bagus dan indah banget, harapannya semoga ada penambahan homestay lainnya disini, namun yang menjadi kekurangannya adalah jalan yang kita tempuh menuju kelokasi ini sudah banyak yang rusak dan sangat berbahaya Ketika hujan turun.”

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat dipahami bahwasanya pihak pengelola desa wisata memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan sektor pariwisata di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan aktif menyebarkan informasi terkait objek wisata kepada calon wisatawan melalui berbagai media yang tersedia. Desa wisata tersebut mengandalkan potensi wisata alam sebagai daya tarik utama, serta dilengkapi dengan fasilitas *homestay* bagi pengunjung yang ingin menginap dan menikmati suasana alam lebih lama. Fasilitas *homestay* tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan desa wisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kunjungan wisatawan.

4. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses implementasi kebijakan publik. Menurut George C. Edward, struktur organisasi yang menjalankan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, jalur koordinasi, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan dalam suatu institusi atau lembaga

pemerintah.

Ketika struktur birokrasi disusun secara jelas dan fungsional, maka proses implementasi akan lebih terarah, terkoordinasi, dan efisien. Sebaliknya, struktur yang tidak rapi atau terlalu berbelit dapat menghambat laju pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Kebijakan Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya, keberadaan birokrasi yang responsif, terorganisir, dan mendukung peran masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat desa maupun kabupaten. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana struktur birokrasi yang ada berperan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Disparekrafpora memiliki tugas agar bisa meningkatkan kunjungan destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya, karena dampaknya untuk kemajuan daerah, bisa meningkatkan penghasilan masyarakat juga bila ada banyak wisatawan yang datang ke Aceh Jaya. Maka dari itu, kami membentuk para Pokdarwis ini untuk membantu program dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam bagian pengembangan destinasi wisata, jadi Pokdarwis ini telah di tuangkan dalam Surat Keputusan, jadi itu langsung dibawah pengawasan Disparekrafpora Aceh Jaya, bila ada masukan untuk pengembangan di daerah wisata kami akan bantu dari program-program yang ada disini, Pokdarwis di desa-desa juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa nya dalam menjalankan tugas”³⁰

Dari hasil wawancara diatas dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya dapat dipahami dinas tersebut memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke

³⁰ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

Kabupaten Aceh Jaya sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap desa yang memiliki potensi wisata.

Pokdarwis dibentuk sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata lokal, dan secara resmi diakui melalui penerbitan Surat Keputusan yang menempatkan mereka langsung di bawah pengawasan Disparekrafpora. Dalam pelaksanaannya, Pokdarwis tidak hanya menjalankan program dari dinas, tetapi juga menjalin koordinasi dengan pemerintah desa masing-masing untuk mendukung program yang ada.

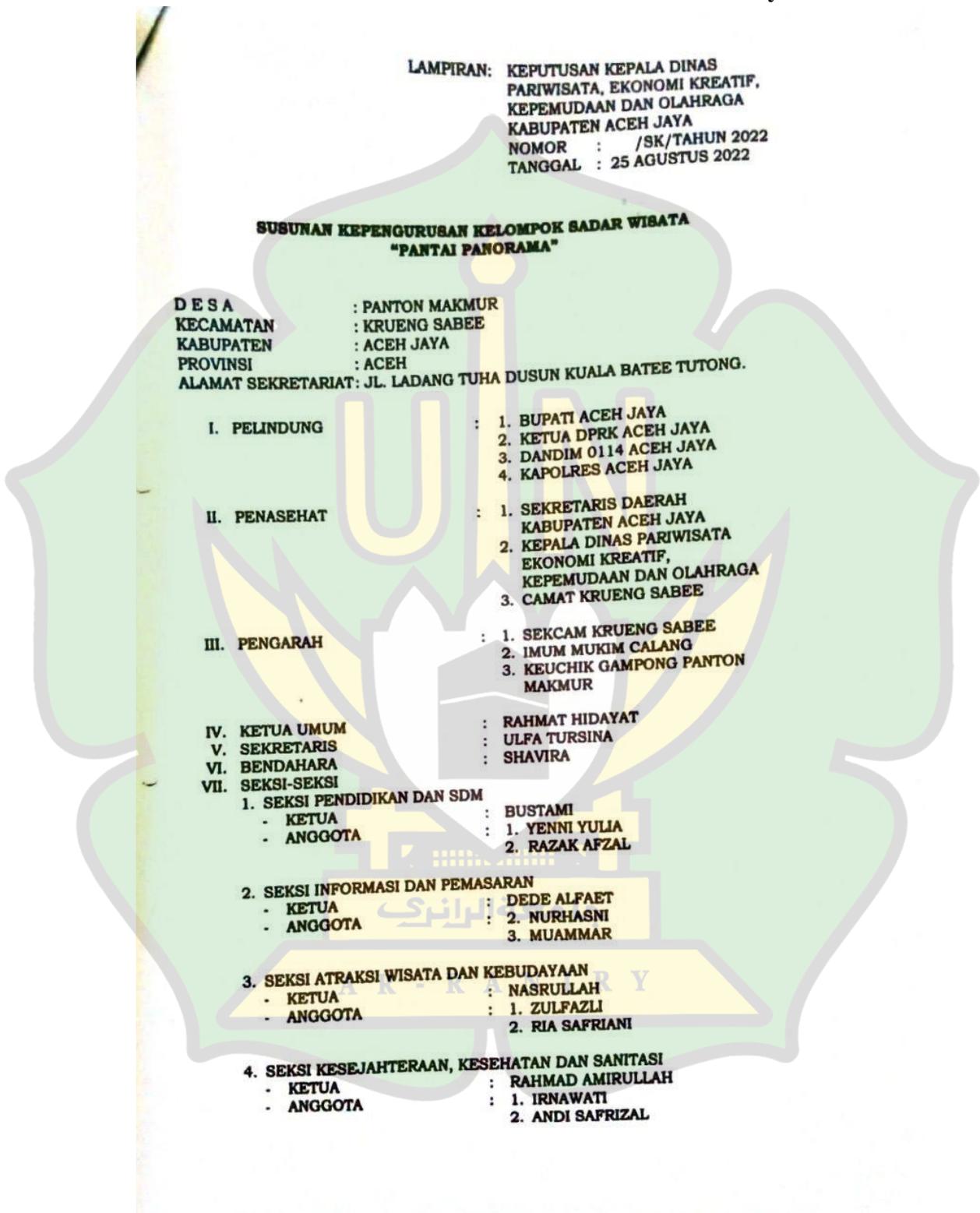
Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora juga menyampaikan pernyataan yang senada dengan Kepala Dinas, beliau mengungkapkan bahwa:

“untuk struktur organisasinya jelas ya, pokdarwis itu di SK kan oleh Disprekrafpora Aceh Jaya, untuk urutan dan tugasnya telah ada di dalamnya, seperti adanya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, itulah ada disana, ya tujuannya biar ada kejelasan dari tugas masing-masing pengurus Pokdarwis”³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora Aceh Jaya dapat dipahami bahwa Struktur organisasi dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Aceh Jaya telah disusun secara jelas dan formal. Narasumber menjelaskan bahwa setiap Pokdarwis yang terbentuk telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Disparekrafpora Aceh Jaya, sehingga keberadaannya sah secara administratif dan memiliki legitimasi hukum.

³¹ Wawancara Kepala Bidang Pariwisata Disparekrafpora pada tanggal 06 Maret 2025

Gambar 4.9.
Struktur Pokdarwis Pantai Panorama Aceh Jaya



- 5. **SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT**
 - KETUA : T.FAHRI
 - ANGGOTA : 1. M.HIDAYAT
2. AKMAL FAHMI
- 6. **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA**
 - KETUA : MAULID
 - ANGGOTA : 1. TARMIZI
2. M. RIJAL AULIADI
- 7. **SEKSI KEAMANAN**
 - KETUA : SALAMUDIN
 - ANGGOTA : 1. FAKRUL
2. M. NASIR
3. M. IHSAN SUBKI

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI
KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ACEH JAYA



JUANDA, S. Pd.I. M. Pd
Pembina Tk.I
Nip. 1978616 200312 1 006

Sumber: Sekretaris Pokdarwis Pantai Panorama Aceh Jaya

Dalam struktur organisasi Pokdarwis tersebut telah diatur dengan rapi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pengurus, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga anggota. Tujuan dari pengaturan struktur ini adalah untuk memastikan adanya pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap individu dalam organisasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif demi mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di desa masing-masing. Berikut merupakan peran dari Pokdarwis yang ada di Aceh Jaya.

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Konservasi Penyu "Aron Meubanja" yang berada di Desa Kuta Kuta memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian

ekosistem penyu laut. Melalui kegiatan pelestarian, kelompok ini aktif melakukan patroli pantai untuk melindungi habitat penyu, mencegah perburuan liar, serta menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Salah satu kegiatan utama mereka adalah proses penetasan telur penyu secara semi-alami, mulai dari pengumpulan telur, perawatan hingga pelepasan tukik ke laut. Selain itu, Pokdarwis "Aron Meubanja" juga menyediakan ruang bagi peneliti, pelajar, dan mahasiswa yang ingin mempelajari ekosistem pesisir dan perilaku penyu secara langsung di lapangan. Tak hanya fokus pada konservasi, kelompok ini juga menjalankan peran edukatif dengan menyoar keluarga dan anak-anak melalui kegiatan seperti kelas alam, pelepasan tukik bersama, serta sosialisasi tentang pentingnya menjaga laut dan biota di dalamnya.

2. Pokdarwis Pantai Nisero merupakan kelompok sadar wisata yang berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata bahari di kawasan pesisir Pantai Nisero. Dengan semangat pemberdayaan masyarakat lokal, Pokdarwis ini mengelola berbagai aset wisata yang menarik dan ramah keluarga, seperti wahana bermain anak yang aman dan edukatif, serta area wisata kuliner yang menyajikan makanan khas daerah berbasis potensi lokal, termasuk olahan hasil laut. Kuliner ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, baik wisatawan lokal maupun luar daerah, karena menghadirkan cita rasa tradisional yang autentik. Selain atraksi wisata sehari-hari, Pokdarwis Pantai Nisero juga pernah menyelenggarakan berbagai kegiatan berskala komunitas maupun regional, seperti Festival Apam, sebuah perayaan budaya kuliner yang mempromosikan kue tradisional sebagai warisan kuliner lokal. Mereka juga mengembangkan area

camping ground di sekitar pantai, yang memberikan alternatif wisata berbasis alam dan cocok untuk kegiatan sekolah, komunitas, maupun wisatawan pencinta alam.

3. Pokdarwis Pantai Panorama Calang merupakan destinasi wisata bahari yang terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat lokal. Terletak di kawasan pesisir yang strategis, pantai ini dikelola secara kolaboratif oleh masyarakat setempat melalui kemitraan antara pengelola wisata, BUMG (Badan Usaha Milik Gampong), dan sejumlah investor yang turut mendorong pengembangan infrastruktur dan layanan wisata. Sebagai destinasi laut, Pantai Panorama Calang memiliki peran penting dalam menyediakan ruang rekreasi yang aman dan menarik bagi wisatawan, sekaligus mendukung ekonomi lokal melalui pengelolaan atraksi dan fasilitas berbasis potensi alam. Pengelola aktif membuka akses wisata yang edukatif dan ramah lingkungan, serta menjaga keindahan alam pesisir sebagai aset utama. Pantai ini menawarkan berbagai fasilitas dan aktivitas unggulan, seperti wisata mancing yang memanfaatkan kekayaan biota laut lokal, serta wisata banana boat yang menghadirkan pengalaman seru bagi pengunjung yang menyukai permainan air. Selain itu, terdapat juga program "hunting pulau", yaitu perjalanan wisata singkat menjelajahi pulau-pulau kecil di sekitar perairan Calang, yang cocok bagi pencinta fotografi, penikmat alam, dan pengunjung yang ingin merasakan suasana laut dari perspektif berbeda. Dalam proses pengembangannya, pengelola Pantai Panorama Calang menjalin kerja sama erat dengan BUMG sebagai mitra lokal, serta menggandeng investor untuk pengadaan fasilitas wisata seperti perahu wisata, gazebo pantai, toilet umum, dan

peningkatan akses jalan menuju lokasi. Tak hanya itu, mereka juga aktif melakukan promosi digital melalui media sosial, dengan rutin membagikan konten visual menarik, testimoni pengunjung, informasi kegiatan, dan paket wisata yang ditawarkan. Strategi ini berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan membangun citra Pantai Panorama Calang sebagai destinasi bahari modern yang tetap mengakar pada nilai lokal.

4. Pokdarwis Ekowisata Mangrove Gampong Baro Sayeng, merupakan kelompok sadar wisata yang fokus pada pelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai destinasi edukatif dan rekreatif berbasis alam. Berada di kawasan pesisir dengan kekayaan hayati yang tinggi, kelompok ini memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan hutan mangrove, yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies. Salah satu tugas utama Pokdarwis adalah melindungi puluhan jenis burung liar yang bermigrasi dan bersarang di kawasan mangrove, serta merawat penangkaran buaya yang menjadi bagian dari keanekaragaman hayati lokal. Selain konservasi, mereka juga membuka peluang wisata seperti trip mancing di muara, yang memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung sekaligus memperkenalkan pentingnya menjaga ekosistem estuari. Pokdarwis juga menyediakan bibit mangrove untuk kegiatan rehabilitasi lingkungan, baik untuk program tanam bersama wisatawan, kegiatan CSR, maupun inisiatif penghijauan lokal. Lebih dari itu, kawasan ini dilengkapi dengan lahan khusus penelitian mangrove, yang terbuka bagi mahasiswa, peneliti, dan instansi yang ingin melakukan studi tentang keanekaragaman, pertumbuhan, dan fungsi ekologis hutan mangrove.

5. Pokdarwis Ceraceu Embon Sarah Raya merupakan kelompok sadar wisata yang berkomitmen dalam melestarikan keindahan alam pedalaman Aceh Jaya, khususnya kawasan hutan dan sungai yang masih alami. Dengan semangat pelestarian lingkungan, kelompok ini berperan aktif dalam menjaga dan merawat kelestarian alam dari ancaman perusakan, termasuk mencegah praktik illegal logging yang merusak ekosistem hutan. Lokasi yang dikelola oleh Pokdarwis ini berada di kawasan terpencil yang hanya bisa diakses melalui jalur air. Untuk menunjang aktivitas wisata dan patroli konservasi, mereka menyediakan fasilitas sampan dan speed boat yang digunakan untuk menyusuri sungai menuju lokasi destinasi. Perjalanan menyusuri sungai ini sendiri menjadi bagian dari daya tarik wisata, menawarkan pengalaman eksplorasi alam yang tenang, hijau, dan penuh pesona. Dengan perpaduan antara konservasi, akses ekowisata, dan keterlibatan masyarakat, Pokdarwis Ceraceu Embon Sarah Raya hadir sebagai penjaga sekaligus penggerak pemanfaatan lestari kekayaan alam pedalaman Aceh Jaya. Mereka bertekad menjadikan kawasan ini sebagai destinasi yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai pelestarian dan keberlanjutan.
6. Pokdarwis Gampong Portugis dan Agrowisata Boh Giri merupakan kelompok sadar wisata yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal dan potensi budaya unik yang dimiliki wilayah mereka. Salah satu kekayaan identitas budaya yang dijaga adalah keberadaan Simata Biru, keturunan Portugis yang telah berbaur dengan masyarakat lokal sejak masa kolonial. Warisan ini menjadi bagian penting dari cerita sejarah dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang tertarik

dengan legenda dan jejak sejarah masa silam. Selain nilai budaya, Gampong Portugas juga dikenal dengan potensi agrowisata jeruk bali atau "boh giri", yang tumbuh subur di lahan masyarakat dan menjadi komoditas lokal bernilai ekonomi tinggi. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati suasana kebun, mencicipi buah langsung dari pohonnya, hingga mengenal cara budidayanya sebagai bagian dari pengalaman edukatif.

4.2.2. Kendala Implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik, proses implementasi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Implementasi bukan hanya sekadar menjalankan perintah dari atas, tetapi juga melibatkan proses dinamis antara berbagai aktor, struktur, dan sumber daya yang saling berinteraksi di lapangan. Dalam program berbasis partisipasi masyarakat, seperti Sadar Wisata, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya melalui wadah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Aceh Jaya.

Pokdarwis menjadi ujung tombak yang menjembatani tujuan kebijakan dengan tindakan nyata di tingkat lokal. Oleh karena itu, memahami bagaimana implementasi dijalankan menjadi langkah penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu berjalan sesuai harapan. Terlepas dari itu, dalam menjalankan suatu kebijakan pasti ada kendala yang akan dihadapi. Berikut merupakan kendala-kendala dalam menjalankan program Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Aceh Jaya. Adapun kendalanya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan program sadar wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Meskipun daerah ini memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam dan komitmen sumber daya manusianya terus dibina melalui pelatihan dan edukasi, namun kendala anggaran dapat membatasi ruang gerak berbagai program yang telah direncanakan.

Anggaran yang terselenggara di bidang pariwisata pada tahun 2025 sekitar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar) lebih sedikit dari tahun lalu karena Aceh Jaya memprioritaskan anggarannya untuk event pora 2026 yang berlangsung di Aceh Jaya. Sedangkan pertahunnya pariwisata Aceh Jaya membutuhkan anggaran minimal Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar) dari APBK untuk segala aktivitas pariwisata dan pembangunan fasilitas pendukung secara bertahap dan merata. Adapun hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti terjawab dibawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau kendalanya dari pemerintah memang anggarannya sedikit berkurang, untuk saat ini hanya 1 miliar untuk bidang pariwisata, jadi itu yang menjadi kendala saat ini kami pasti akan terus usahakan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan pengembangan tempat wisata disini, kalau dari masyarakat juga ada mis komunikasi yang terjadi dilapangan antara masyarakat dan pemuda-pemuda misalnya, dan itu wajar-wajar saja bila ada mis komunikasi, ini yang disampaikan Pokdarwis kepada kami, ada juga kurang partisipasinya masyarakat dalam sama-sama mendukung, ke ikutserataannya yang mungkin terjadi di masyarakat, ya mungkin ada perihal lain

sehingga tidak bisa bergabung”³²

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Aceh Jaya, khususnya yang berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu keterbatasan anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Jaya untuk bidang pariwisata hanya 1 Miliar saja, sedangkan kebutuhan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya berkisaran 5 Miliar per tahunnya dan tantangan sosial di masyarakat.

Dari sisi pemerintah, tantangan utama adalah berkurangnya alokasi anggaran, yang tentu berdampak langsung pada optimalisasi program pengembangan destinasi wisata. Meskipun demikian, pihak pemerintah tetap berupaya untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia agar kegiatan-kegiatan yang mendukung pariwisata tetap dapat berjalan.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, narasumber mengungkapkan bahwa ada tantangan komunikasi di lapangan, terutama antara kelompok pemuda pengelola Pokdarwis dan sebagian masyarakat. Ketidaktepatan atau miskomunikasi yang terjadi terkadang menimbulkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pariwisata. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang membuat sebagian warga belum bisa ikut terlibat langsung dalam kegiatan bersama.

Selanjutnya, Ketua Pokdarwis Pasie Luah, Desa Dayah Baroe, Kecamatan Krueng Sabee juga menyatakan kepada peneliti, bahwa:

“Kendala kami dipokdarwis sebetulnya ada di masalah keuangan juga, masalah

³² Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

promosi dan masalah2 komunikasi sesekali dengan tokoh agama, ini karena di area pantai jadi banyak juga masyarakat yang memantau, tapi karena keterbatasan keuangan ini jadinya kami disini susah untuk mempromosikan, seperti enggak bisa bayar pihak media untuk membantu penyebaran informasi wisata, juga alat penunjang kami butuhkan disini, ya kalau ada anggaran mungkin kami sudah maju dan banyak diketahui oleh orang dari kabupaten lain untuk berkunjung”³³

Hal senada di atas juga disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Pantai Nisero, Desa Kede Tuha, beliau menambahkan bahwa:

“Kalau disini kendala anggaran ya, jadi kami gak bisa beli alat-alat untuk arena di laut, kadang juga bisa bayar yang bersih2 disini kalau ada anggaran, jadi kami bisa alokasikan uang tersebut untuk kebutuhan di area pantai, bisa bangun WC umum juga untuk kenyamanan”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara, Pokdarwis mengungkapkan sejumlah kendala utama yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan promosi destinasi wisata. Kendala yang paling dominan adalah masalah keuangan, yang berdampak langsung pada aspek promosi dan penyediaan alat penunjang destinasi.

Disebutkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan mereka kesulitan menjalin kerja sama dengan media untuk menyebarluaskan informasi tentang wisata lokal. Akibatnya, potensi wisata yang dimiliki belum banyak diketahui oleh masyarakat luar daerah, padahal destinasi tersebut memiliki daya tarik tersendiri.

Selain itu, kendala juga muncul dalam komunikasi sosial, terutama sesekali terjadi ketegangan atau miskomunikasi dengan tokoh agama setempat. Hal ini karena lokasi wisata yang dikelola berada di wilayah pantai, yang menjadi perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat sekitar yang turut memantau aktivitas di area tersebut. Keluhan lain

³³ Wawancara Ketua Pokdarwis Pasie Luah, Desa Dayah Baroe, Kecamatan Krueng Sabee pada tanggal 12 Maret 2025

³⁴ Wawancara Ketua Pokdarwis Pantai Nisero, Desa Kede Tuha, Kecamatan Panga pada tanggal 15 Maret 2025

yang disampaikan adalah keterbatasan alat pendukung operasional, yang seharusnya dapat menunjang pelayanan dan kenyamanan pengunjung. Mereka meyakini bahwa dengan adanya dukungan anggaran yang cukup, kemajuan destinasi akan lebih signifikan dan mampu menarik kunjungan dari daerah-daerah lain.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam keberhasilan pengelolaan destinasi wisata, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas seperti yang dikelola oleh Pokdarwis. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kurangnya dukungan aktif dari masyarakat, terutama dalam hal keterlibatan langsung dalam kegiatan wisata yang diselenggarakan. Beberapa faktor seperti miskomunikasi antara pemuda dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, menyebabkan adanya kesenjangan dalam persepsi dan harapan terhadap pengelolaan wisata, khususnya di wilayah pantai yang rentan terhadap norma sosial dan nilai keagamaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi ini masih menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrappora) di Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Selain kendala keuangan, dilapangan juga kita dengar tentang partisipasi masyarakat yang kurang, kurang partisipasi dalam promosi, Cuma kita tidak menyalahkan sepenuhnya, ya mungkin ada alasan-alasan pribadi yang tidak tahu alasannya. Tapi kendala-kendala itu kita tamping dan pada saat kami melakukan kunjungan ke desa wisata, kami mengingatkan kepada warga untuk saling bergotong-royong dalam

mempromosikan tempat wisatanya”³⁵

Dalam wawancara tersebut, Kepala Disparekrafpora Kabupaten Aceh Jaya mengungkapkan bahwa selain kendala utama berupa keterbatasan anggaran, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan promosi destinasi wisata. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang belum aktif mendukung kegiatan promosi wisata di desa mereka. Namun, pihak dinas tidak serta-merta menyalahkan masyarakat secara langsung, mengingat ada kemungkinan berbagai alasan pribadi yang melatarbelakangi kurangnya keterlibatan tersebut.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi tersebut, Disparekrafpora terus berupaya membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan langsung. Salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke desa-desa wisata dan memberikan penguatan serta motivasi kepada warga untuk bergotong-royong dan berperan aktif dalam memajukan sektor pariwisata. Dinas menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam mempromosikan destinasi wisata lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat sekitar.

Kemudian, wawancara peneliti dengan Ketua Pokdarwis Konservasi Penyu Aroen Meubanja, Kecamatan Panga juga menyampaikan perihal yang sama tentang kendala, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau kami disini sebetulnya membutuhkan banyak orang dan anak muda yang ikut berpartisipasi dalam persiapan acara dan pembersihan pantai disini, tetapi kami juga tidak bisa melarang untuk mereka tidak berhadir, ya terkandung ada yang sibuk dengan kerjanya, kendalanya kurangnya berpartisipasi masyarakat, juga termasuk dalam

³⁵ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2025

promosi tempat wisata”³⁶

Gambar 4.10.
Pokdarwis Konservasi Penyu Aroen Meubanja



Dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pokdarwis Konservasi Penyu Aroen Meubanja, Kecamatan Panga dan dokumentasi di atas dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan destinasi wisata, partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pemuda menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola wisata di daerah tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam kegiatan persiapan acara dan pembersihan area pantai. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat dapat terlibat aktif karena alasan pekerjaan atau kesibukan pribadi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya kegiatan pengelolaan dan promosi tempat wisata.

³⁶ Wawancara Ketua Pokdarwis Konservasi Penyu Aroen Meubanja, Kecamatan Panga pada tanggal 15 Maret 2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas terkait Implementasi Kebijakan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses komunikasi antara Disparekrafpora dan Pokdarwis di desa-desa sudah terjalin secara aktif melalui berbagai metode, baik secara langsung melalui sosialisasi dan pelatihan, maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam menyampaikan informasi, arahan, serta dukungan dari pemerintah kepada pelaksana di lapangan. Kemudian, Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Pokdarwis umumnya terdiri dari pemuda-pemuda lokal yang memiliki semangat tinggi dalam memajukan pariwisata daerah. Disparekrafpora juga aktif melakukan pelatihan dan pembinaan, seperti pelatihan *home stay*, pelatihan manajemen pariwisata, Pengapresiasian kepada pokdarwis dan destinasi teraktif, pelatihan konten kreator dan animasi, pelatihan kerajinan tangan dan pelatihan tourgait. Selanjutnya, baik pemerintah daerah maupun Pokdarwis menunjukkan sikap yang positif dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Para pengurus Pokdarwis tampak memiliki tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, serta keinginan untuk terus belajar dan berkontribusi bagi

daerahnya. Dan terakhir, struktur organisasi Pokdarwis telah ditetapkan secara jelas melalui SK dari Disparekrafpora, yang mencakup pembagian peran seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kejelasan struktur ini membantu pelaksanaan tugas secara sistematis dan akuntabel. Selain itu, adanya koordinasi antara Pokdarwis dan pemerintah desa menunjukkan hubungan kelembagaan yang mendukung keberlangsungan program.

2. Dalam Implementasi Kebijakan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya, Pokdarwis di Kabupaten Aceh Jaya menghadapi dua tantangan utama, yaitu keterbatasan anggaran, sulitnya mempromosikan dan dukungan partisipasi masyarakat. Dari sisi pendanaan, Pokdarwis belum memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mengelola dan mempromosikan destinasi secara maksimal. Operasional sehari-hari, seperti kebersihan lokasi, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan promosi, masih bergantung pada pemasukan dari tiket masuk atau kontribusi penjual lokal di sekitar lokasi wisata. Selain itu, keterbatasan anggaran membuat Pokdarwis kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan media promosi, memperbarui fasilitas penunjang, serta menyelenggarakan program-program yang bisa meningkatkan daya tarik wisata. Sementara itu, dari sisi partisipasi masyarakat, masih ditemukan kurangnya keterlibatan warga dalam mendukung program Pokdarwis, baik dalam bentuk tenaga, kehadiran dalam kegiatan gotong-royong, maupun kontribusi ide dan promosi. Beberapa masyarakat lebih memilih fokus pada aktivitas pribadi atau pekerjaan sehari-hari sehingga tidak selalu tersedia waktu untuk ikut serta dalam kegiatan wisata desa.

5.2. Saran

Saran untuk Disparekrafpora Aceh Jaya:

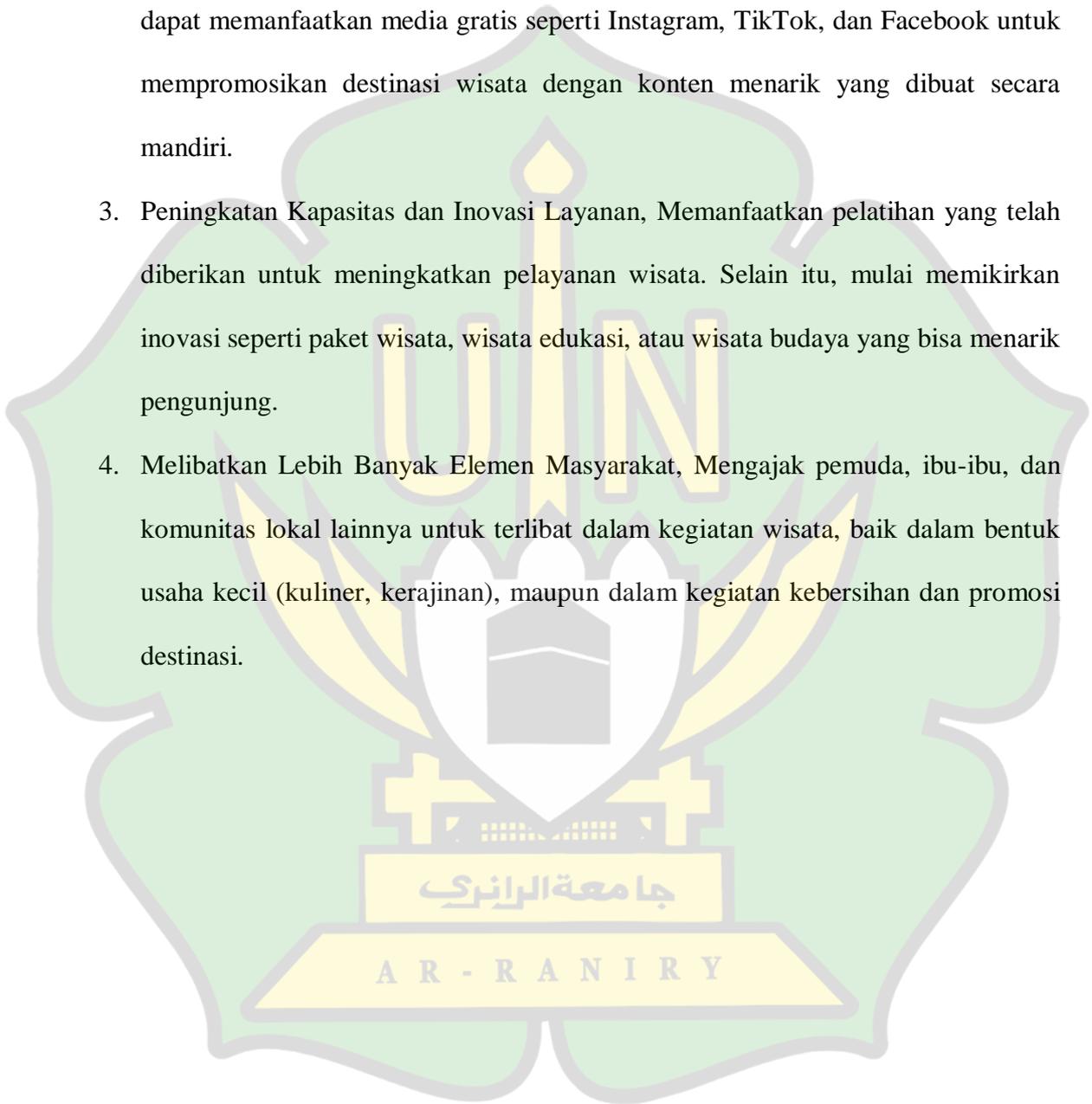
1. Optimalisasi Anggaran yang Ada, dengan adanya keterbatasan dana, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, fokus pada program pelatihan dan pengembangan SDM yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pariwisata.
2. Penguatan Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan Swasta, Mendorong sinergi lebih kuat dengan pemerintah desa, BUMDes, serta sektor swasta untuk menggali potensi pendanaan tambahan atau sponsorship dalam mendukung kegiatan wisata.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Melakukan pendekatan personal dan kultural kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata di desa mereka. Misalnya, mengadakan pertemuan warga, gotong royong rutin, serta pelibatan tokoh masyarakat atau agama dalam kegiatan wisata.
4. Pemanfaatan Media Sosial dan Digitalisasi Promosi, Membantu Pokdarwis dalam membuat strategi promosi digital yang efisien, seperti pelatihan membuat konten wisata, promosi lewat media sosial, serta pembuatan website atau platform pariwisata daerah.
5. Evaluasi dan Pendampingan Rutin, Melakukan pemantauan berkala ke desa wisata untuk memberikan evaluasi dan arahan langsung, sekaligus menampung aspirasi dari pengelola dan masyarakat.

Saran untuk Pokdarwis Aceh Jaya:

1. Penguatan Komunikasi Internal dan Eksternal, Menjaga koordinasi yang solid antaranggota Pokdarwis serta dengan Disparekrafpora dan pemerintah desa.

Gunakan media komunikasi seperti grup WhatsApp untuk informasi cepat dan diskusi rutin.

2. Kreativitas dalam Promosi Mandiri, Meskipun terkendala anggaran, Pokdarwis dapat memanfaatkan media gratis seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan destinasi wisata dengan konten menarik yang dibuat secara mandiri.
3. Peningkatan Kapasitas dan Inovasi Layanan, Memanfaatkan pelatihan yang telah diberikan untuk meningkatkan pelayanan wisata. Selain itu, mulai memikirkan inovasi seperti paket wisata, wisata edukasi, atau wisata budaya yang bisa menarik pengunjung.
4. Melibatkan Lebih Banyak Elemen Masyarakat, Mengajak pemuda, ibu-ibu, dan komunitas lokal lainnya untuk terlibat dalam kegiatan wisata, baik dalam bentuk usaha kecil (kuliner, kerajinan), maupun dalam kegiatan kebersihan dan promosi destinasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Andi Mussaddad Mukhlis, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar* (Makassar: Repository UNHAS, 2021).
- Jusuf Soewadji (2012) *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Menawan, KKN-PPM Buayan. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*, 2021.
- Mukhlis, Andi mussaddad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar*. Makassar: Repository UNHAS, 2021.
- Nurwahyuni, Ika. *Pengetahuan Dan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk Sempor Kabupaten Kebumen*. Unnes Press, 2019.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Unisri Press, 2020.
- Rudina, M., & Taufik, L. D. "Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Pela Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara" 2022, no. 4 (2022): 796–806.
- Subarsono (2021) *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: pustaka belajar)
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,)
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Medan: Repository UMA, 2022.

Peraturan:

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008
Tentang Sadar Wisata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

Website:

Disparekrafparpora tetapkan lima destinasi unggulan Aceh Jaya
<https://www.lensakita.com/2023/02/07/disparkrafparpora-tetapkan-lima-destinasi-unggulan-aceh-jaya/> di akses pada tanggal 15 Februari 2023

Pokdarwis Sebagai Penggerak Kepariwisataan Desa
<https://www.masterplandes.com/artikel/pokdarwis-sebagai-penggerak-kepariwisataan-des/> di akses pada tanggal 15 Februari 2023



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1888/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **04 Agustus 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing I
2. Delfi Suganda, S.HI., LL.M. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Rahmat Hidayat
- NIM : 180802108
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Implementasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Aceh Jaya
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-395/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/02/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 180802108

Nama : RAHMAT HIDAYAT

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : DS.PANTON MAKMUR, KEC.KRUENG SABEE, KAB.ACEH JAYA,
PROV.ACEH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASIKELOMPOK SADAR WISATA DI KABUPATEN ACEH JAYA**

Banda Aceh, 24 Februari 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 23 Juni 2025

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara Kepala Disparekrafpor Aceh Jaya



Kepala Bidang Pariwisata Disparekraf Aceh Jaya



Ketua pokdarwis Pasie Luah, Ikram



etua pokdarwis Pantai Nisero Efendi



Ketua pokdarwis Konservasi penyu aron meubanja, Dedy



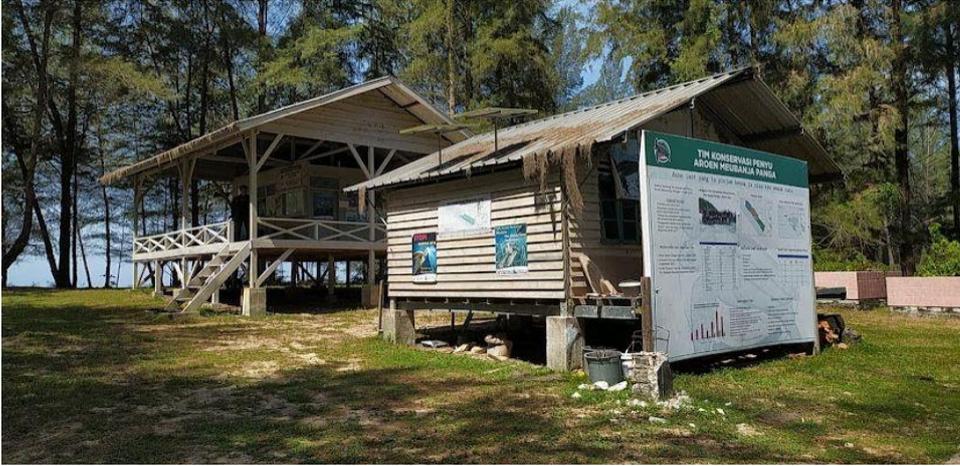
Ketua Pokdarwis Sadar Lestari. Zahlul



Pengunjung



Pengunjung



Konservasi Penyu



Toilet tempat wisata yang kurang layak